WARTA PEMERIKSA

EDISI 12 ■ VOL. IV ■ DESEMBER 2021

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

SILVER WINNER
PRIA AWARD
2021

BPK UNGKAP 14.501 PERMASALAHAN SENILAI RP8,37 TRILIUN

8
Gender Audit untuk Mendukung Kesetaraan

27
BPK Terpilih Sebagai Wakil Ketua UN Panel External Auditor

44
BPK Alami Kemajuan Signifikan dalam Dua Tahun

Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Peringatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan cara-cara memerangi penyakit yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai fenomena global tersebut. Sementara itu, pada 22 Desember, masyarakat di Indonesia memperingati Hari Ibu. Peringatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kebaikan dan jasa ibu sebagai sosok wanita yang telah membesarkan anaknya.

Melihat urgensinya, maka redaksi pun mencoba mengangkat dua isu itu dalam *Warta Pemeriksa* edisi Desember 2021 ini. Kami memandang bahwa perempuan dapat berperan sebagai titik awal dalam pencegahan korupsi. Ini mengingat perempuan, khususnya ibu, dianggap memegang peranan kunci dalam pendidikan moral keluarga.

Karenanya, di rubrik Komunitas pada edisi kali ini, redaksi menyajikan hasil wawancara dengan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ciri khas gerakan yang lahir pada 22 April 2014 ini terletak dari cara penyampaian nilai-nilai antikorupsi dengan menggunakan permainan dan pemakaian atribut yang menjadi pembeda para anggota gerakan.

Redaksi sepaham dengan SPAK yang percaya bahwa perubahan secara luas harus dimulai dari perubahan individu. Perubahan ini harus dimulai dari keluarga, lalu ke jaringan yang lebih luas, melalui komunitas, tempat kerja dan akhirnya masyarakat secara keseluruhan.

Laporan lain yang kami siapkan yaitu terkait dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 yang telah diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disampaikan, terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun yang diungkap BPK selama pemeriksaan pada semester I 2021.

Permasalahan yang paling banyak ditemukan yaitu permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Jumlahnya mencapai 7.512 permasalahan atau mencapai 52 persen. Selanjutnya, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 6.617 permasalahan (46 persen). Adapun sisanya, sebanyak 372 (2 persen) berupa permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar.

Di rubrik Internasional, kami menyajikan informasi mengenai keberhasilan BPK yang terpilih sebagai Vice-Chair of UN Panel of External Auditors untuk masa jabatan Desember 2021 sampai dengan Desember 2022. Keputusan itu diambil melalui kesepakatan seluruh anggota panel pada hari kedua penyelenggaraan "Sixty-first (2021) Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies, and the International Atomic Energy Agency".

Simak juga upaya BPK dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan *big data analytics* (BDA). Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 2020 antara lain, pengembangan *grand design* BPK Big Data Analytics (Bidics).

Masih banyak informasi lain yang kami rangkum dalam edisi Desember 2021. Selain itu, redaksi juga ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk pembaca semua. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun mendatang. Selamat menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah
Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi
Dian Rosdiana

Kepala Sekretariat
Trisari Istiati

Sekretariat
Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S
Apriyana
Sudarman

Alamat Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

4 BPK UNGKAP 14.501 PERMASALAHAN SENILAI RP8,37 TRILIUN

Permasalahan yang paling banyak ditemukan merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

8 *GENDER AUDIT* UNTUK MENDUKUNG KESETARAAN

11 HASIL PEMERIKSAAN BPK BANTU PEMERINTAH HEMAT BELANJA SUBSIDI RP1,85 TRILIUN

15 PEMERIKSAAN BPK UNGKAP KELEBIHAN PEMBEBANAN *COST RECOVERY* SENILAI RP994,51 MILIAR

17 PELAYANAN REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN PERLU DIPERBAIKI

19 BPK RAMPUNGKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SENILAI RP 52,87 TRILIUN

22 PENTINGNYA PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

25 BPK SAMPAIKAN MASUKAN TERKAIT KONSOLIDASI ANGGARAN DI PBB

27 BPK TERPILIH SEBAGAI WAKIL KETUA UN PANEL EXTERNAL AUDITOR

28 WAKIL KETUA BPK BAHAS PENGEMBANGAN PERAN PEMERIKSA EKSTERNAL DI PBB

30 KEPALA BPK PERWAKILAN SULAWESI UTARA, KARYADI ‘MENONJOLKAN MANFAAT BPK’

34 PENELITI PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA, ZAENUR ROHMAN ‘PEREMPUAN BISA MEMBAWA PERUBAHAN’

36 BPK TERUS DORONG PEMANFAATAN *BIG DATA ANALYTICS*

40 GERAKAN PEREMPUAN MENCEGAH KORUPSI

44 BPK ALAMI KEMAJUAN SIGNIFIKAN DALAM DUA TAHUN

49 KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA BAGI PEMERIKSA, PERLUKAH?

52 BERITA FOTO

BPK UNGKAP 14.501 PERMASALAHAN SENILAI RP8,37 TRILIUN

Permasalahan yang paling banyak ditemukan merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021. Terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun yang diungkap BPK selama pemeriksaan pada semester I 2021.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, permasalahan yang paling banyak ditemukan merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Jumlahnya mencapai 7.512 permasalahan atau mencapai 52 persen. Selanjutnya, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 6.617 permasalahan (46 persen). Adapun sisanya, sebanyak 372 (2 persen) berupa permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar.

"Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 7.512 permasalahan, sebanyak 4.774 permasalahan sebesar Rp8,26 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan, yang terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.104 permasalahan sebesar Rp1,94 triliun, potensi kerugian sebanyak 612 permasalahan sebesar Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.058 permasalahan sebesar Rp5,55 triliun," kata Ketua BPK dalam penyerahan IHPS I Tahun 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Selasa (7/12).

Atas berbagai permasalahan yang diungkapkan BPK, entitas telah menindaklanjutinya dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan. Jumlahnya sebesar Rp967,08 miliar (11,7 persen), di antaranya sebesar Rp656,46 miliar (68 persen) merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya.

Ketua BPK mengatakan, IHPS I Tahun 2021 secara keseluruhan memuat 128 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

■ Penyerahan IHPS I Tahun 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Selasa (7/12).

(LKKL) Tahun 2020, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

"Penting kami tekankan bahwa, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini, BPK berupaya keras dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan, praktik internasional terbaik, khususnya dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat," kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, BPK pada semester I 2020 juga memeriksa 30 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), yaitu 11 berasal dari Asian Development Bank (ADB), 4 dari World Bank, 11 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 3 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing Facility (GFF). Hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh PHLN pada umumnya dikelola dengan akuntabilitas yang baik.

Terkait pemeriksaan kinerja, BPK melakukan 39 pemeriksaan atas empat objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 34 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah, dan 1 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan, antara lain, pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor TA 2019 sampai dengan semester I TA 2020 yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain Ditjen Hubdat belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNBP SRUT.

■ **Ketua BPK Agung Firman Sampurna**

Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), BPK melakukan 20 pemeriksaan atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah, dan 18 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Salah satu pemeriksaan yang signifikan adalah pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP) pada 13 objek pemeriksaan terkait subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan KPP di bidang angkutan umum telah memenuhi sejumlah kriteria. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.

Pemeriksaan PC-PEN

IHPS I Tahun 2021 turut memuat hasil pemeriksaan BPK atas program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sama seperti yang telah dilakukan BPK pada semester II tahun 2020, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan *risk based comprehensive audit* yang merupakan gabungan tujuan dari ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan *audit universe* keuangan negara.

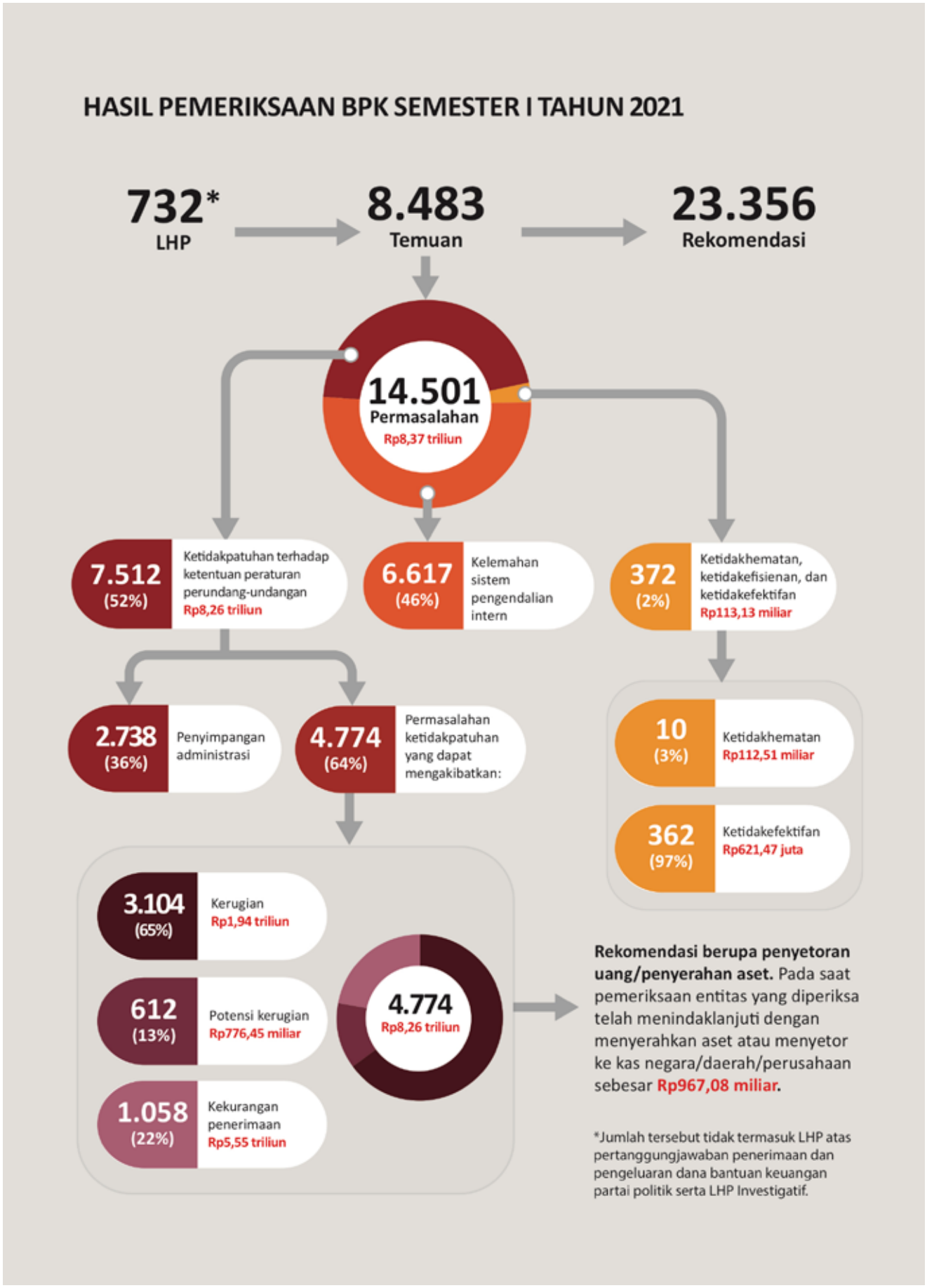
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2021
732*
LHP
8.483
Temuan
23.356
Rekomendasi
14.501
Permasalahan
Rp8,37 triliun
7.512
(52%)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Rp8,26 triliun
6.617
(46%)
Kelemahan sistem pengendalian intern
372
(2%)
Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
Rp113,13 miliar
2.738
(36%)
Penyimpangan administrasi
4.774
(64%)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:
10
(3%)
Ketidakhematan
Rp112,51 miliar
362
(97%)
Ketidakefektifan
Rp621,47 juta
3.104
(65%)
Kerugian
Rp1,94 triliun
612
(13%)
Potensi kerugian
Rp776,45 miliar
1.058
(22%)
Kekurangan penerimaan
Rp5,55 triliun
4.774
Rp8,26 triliun
Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp967,08 miliar.
*Jumlah tersebut tidak termasuk LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik serta LHP Investigatif.

Ketua BPK menjelaskan, pada semester II 2020, BPK melakukan dua jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan. Adapun pada semester I 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pemeriksaan ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan bahwa program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan, akuntabel, taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif," katanya.

Pemeriksaan BPK pada semester I 2021 mengungkapkan beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan PC-PEN. Permasalahan tersebut, antara lain, dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang telah diserahkan kepada DPR RI pada Sidang Paripurna pada 22 Juni 2021, yang secara umum konsolidatif dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian.

Kendati demikian, terdapat permasalahan PC-PEN yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pada Kementerian Sosial. Permasalahan pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Permasalahan selanjutnya, penyajian piutang bukan pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi, KPM tidak bertransaksi, dan tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data *by name by address* dan data rekening koran KPM. ●

PERAN *FORESIGHT*

Dalam penyerahan IHPS I 2021 kepada DPR, Ketua BPK juga menyampaikan mengenai peran *foresight* yang kini dijalankan BPK. Ketua BPK mengatakan, peran *oversight* dan *insight* telah dilakukan BPK melalui pemeriksaan dan pemberian rekomendasi signifikan untuk perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Saat ini, kata dia, BPK melakukan peran *foresight* untuk memberikan pandangan kepada pemerintah, legislatif, dan masyarakat mengenai tantangan dan peluang negara di masa depan serta berbagai isu kebijakan jangka panjang dalam menghadapi tantangan atau risiko masa depan yang penuh ketidakpastian sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.

Ketua BPK menegaskan, BPK sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) tidak hanya memiliki peran sebatas *oversight* atau melakukan pengawasan melalui berbagai pemeriksaan/audit atas tanggung jawab keuangan negara dan *insight* yaitu dengan memberikan pandangan terkait perbaikan kebijakan publik secara komprehensif. BPK juga memiliki peran *foresight*, yakni memberikan pilihan kepada pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan.

Atas alasan itulah, BPK pada Oktober lalu telah menyelesaikan penyusunan pendapat dalam bentuk *Strategic Foresight* yang pertama terkait skenario Indonesia Tahun 2026, dengan judul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh". Pendapat tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 dan selanjutnya dirilis kepada seluruh pemangku kepentingan pada 21 Oktober 2021.

Dengan dirampungkannya *foresight* tersebut, BPK menjadi SAI pertama di Asia Tenggara, kedua di Asia setelah Korea Selatan, dan ke-12 di dunia, yang telah mencapai peran dan kapasitas *foresight*. "Kami percaya, bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama, yakni setiap rupiah uang negara harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola secara transparan, dikelola sebaik-baiknya agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara," ujar Ketua BPK. ●

GENDER AUDIT UNTUK MENDUKUNG KESETARAAN

BPK dapat memeriksa peran APBN dalam memberikan manfaat kepada perempuan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai dapat menjadi pelopor dalam inisiatif *gender audit* atau pemeriksaan untuk menilai upaya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan keuangan negara. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin menyampaikan, BPK sebagai salah satu *supreme audit institution* (SAI) dapat memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan suatu program pemerintah responsif gender.

"Data menunjukkan masih banyak diskriminasi dan kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan," ungkap Lenny kepada *Warta Pemeriksa*, Selasa (28/12).

Lenny mengungkapkan, penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 jiwa dan 49,42 persen di antaranya adalah perempuan. Kemudian, 53,6 persen dari jumlah tersebut berada di usia produktif.

Menurut Lenny, Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Dia mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah memasukkan isu gender dalam salah satu dari empat upaya pengarusutamaan.

"Sebetulnya, kalau kita lihat dari komitmennya, sudah banyak sekali regulasi yang kita buat dan mengamanatkan ayo negara Indonesia kita wujudkan kesetaraan gender," ujar Lenny.

Dia menjelaskan, kesetaraan itu artinya perempuan dan laki-laki berdaya tetapi tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu jauh antara keduanya.

Indonesia pun memiliki peran strategis dalam isu kesetaraan gender bahkan hingga ke level global. Presiden Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari 10 kepala negara di dunia sebagai *gender champion*.

Seiring Presidensi G20 Indonesia pada 2022, Kementerian PPPA juga telah ditunjuk menjadi *mother ministry* untuk Women20 dan G20 Empower. Kemudian, di tingkat ASEAN, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, sejak Oktober lalu ditetapkan sebagai Chair of ASEAN Ministers on Women. Lenny pun telah ditetapkan sebagai Chair of ASEAN Committee on Women.

"Artinya, kita di ranah nasional dan global memegang peran strategis," ungkapnya.

Data menunjukkan masih banyak diskriminasi dan kesenjangan gender di berbagai bidang

pembangunan. Lenny menjelaskan, diskriminasi gender antara lain berupa marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotipe. Hal ini bisa terjadi di rumah, ruang publik, dan tempat kerja.

"Meski banyak kemajuan yang dialami perempuan di Indonesia, tapi masih ada kesenjangan dan ketertinggalan," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lenny menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sejak 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan dari 66,53 menjadi 71,94. IPM laki-laki dan perempuan Indonesia pun secara konsisten mengalami kenaikan.

Akan tetapi, Lenny menyoroti tingkat kesenjangan gender yang tak banyak berubah sejak sebelas tahun terakhir. Jarak IPM laki-laki dan perempuan sejak 2010 hingga 2020 tetap berselisih sekitar 7 poin.

"Itu artinya kita harus *do something* untuk memperkecil kesenjangan itu," tegasnya.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia mengalami lonjakan signifikan terutama pada 2019 menjadi 75,24 dari sebelumnya 72,1 pada 2018. Hal ini diukur dari faktor ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengambilan keputusan.

Menurut Lenny, angka ini naik cukup signifikan karena terdorong partisipasi perempuan di politik. "Dulu hanya 17 persen, terus kemudian naik di atas 20 persen. Itu memicu indeks pemberdayaan gender naik," ujarnya.

Terkait isu kemiskinan, perempuan pun lebih tinggi dari laki-laki. Pada 2020, perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mencapai 9,96 persen. Sementara itu, laki-laki mencapai 9,59 persen. Persoalan-persoalan tersebut, menurut Lenny, menuntut adanya upaya serius dalam pengarusutamaan gender.

Lenny mengatakan, faktor kesenjangan gender dapat dilihat dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses berkaitan dengan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk menjangkau atau memperoleh sumber daya pembangunan. Partisipasi berkaitan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam proses kegiatan pembangunan. Kontrol berkaitan dengan kewenangan laki-laki dan perempuan untuk mengambil keputusan serta manfaat berkaitan dengan hasil guna yang dirasakan dan dinikmati laki-laki maupun perempuan dari proses pembangunan.

Menurut Lenny, BPK bisa memanfaatkan empat acuan kesenjangan gender tersebut dalam

■ **Lenny N. Rosalin**

pemeriksaannya terutama terkait faktor manfaat. Dia mencontohkan, BPK dapat memeriksa peran APBN dalam memberikan manfaat kepada perempuan.

"Misalnya, BPK memeriksa sejauh mana bantuan sosial bisa mengurangi kemiskinan. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) itu efektif atau tidak? Dilihat dari aspek gender sudah memberikan manfaat bagi para perempuan atau belum?" ungkap Lenny.

Dia menyampaikan, BPK bisa mendukung upaya pengarusutamaan gender dengan mengambil inisiatif *gender audit* tersebut. Menurutnya, hal ini juga telah dilaksanakan oleh sejumlah SAI negara lain.

"Saya kira ini menjadi sangat baik apabila pengalaman dari banyak negara bisa dipelopori oleh BPK dalam menyoroti masalah gender dalam auditnya," ujar Lenny.

Dia mengatakan, proses itu bisa dimulai dengan melaksanakan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender yakni terkait komitmen, kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya. Kemudian, terkait pedoman dan metode, BPK bisa merujuk pada referensi global bagaimana SAI di negara lain melakukan *gender audit*.

"Kemudian terkait data sistem informasi dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* BPK," kata Lenny. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menerima Penghargaan
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021
Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Aryadi Safutra

HASIL PEMERIKSAAN BPK BANTU PEMERINTAH HEMAT BELANJA SUBSIDI RP1,85 TRILIUN

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi mengungkapkan 115 temuan yang memuat 181 permasalahan.

Pada semester I 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi. Pemeriksaan dilakukan terhadap operator penerima subsidi berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan pengelolaan subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan di 14 entitas yaitu delapan BUMN berbentuk perseroan terbatas, 5 anak perusahaan BUMN, serta 1 perseroan terbatas swasta.

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2020 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,85 triliun dan koreksi positif senilai Rp3,06 miliar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2020 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp168,16 triliun menjadi Rp166,31 triliun.

"Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan," ungkap BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021.

BPK mengungkap, PT PLN belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran subsidi listrik sebesar Rp847,89 miliar. Dari pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PLN agar lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi biaya baik BPP maupun non-BPP.

PT PLN belum memutakhirkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 berdasarkan evaluasi periode sebelumnya dan RUPTL tersebut belum ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Sehingga, PT PLN masih menggunakan RUPTL 2019-2028. Selain itu, PT PLN belum cermat menghitung *demand forecast* sehingga terjadi deviasi signifikan antara asumsi dengan realisasi RUPTL.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakefisienan biaya pokok penyediaan tenaga listrik. BPK merekomendasikan, direksi PT PLN agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan RUPTL 2021–2030 dan lebih cermat dalam menghitung *demand forecast* dengan mempertimbangkan deviasi asumsi dan realisasi pertumbuhan ekonomi dan penjualan listrik tahun sebelumnya.

Kemudian, pada 2020, pemerintah telah melakukan pembayaran dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) Minyak Solar PT Pertamina dan PT AKR Corporindo tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp44,99 triliun dan sebesar Rp659,46 miliar. Di dalam dana kompensasi tersebut terdapat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterima oleh PT Pertamina dan PT AKR Corporindo masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan sebesar Rp28,67 miliar, namun belum disetorkan karena pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM.

Akibatnya, terdapat kelebihan penerimaan Pertamina dan PT AKR Corporindo atas pembayaran dana kompensasi pemerintah di tahun 2020 karena di dalamnya terdapat komponen PBBKB masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan Rp28,67 miliar. Direksi PT Pertamina dan Direksi PT AKR Corporindo pun diminta agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan dan/atau mekanisme penyetoran PBBKB.

Penatausahaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg oleh lembaga penyalur PT Pertamina juga tidak tertib. Subpenyalur tidak mencatat penjualan dalam *logbook* sebanyak 33.891 kg dan subpenyalur mengisi logbook tidak sesuai kondisi riil sebanyak 2,56 juta kg.

Akibatnya, penyaluran LPG Tabung 3 Kg tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp15,70 miliar dan berpotensi tidak tepat sasaran. Direksi PT Pertamina direkomendasikan agar melakukan koreksi kurang volume penyaluran sebanyak 2,59 juta kg dengan nilai subsidi sebesar Rp15,70 miliar dari perhitungan subsidi tahun 2020.

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan distributor yang berlaku sejak Januari sampai September 2020 tidak mencantumkan klausul pengenaan denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor di gudang produsen. Sejak Oktober 2020, klausul tersebut telah dicantumkan dalam SPJB, namun distributor yang terlambat mengambil pupuk selama bulan Oktober hingga Desember 2020 belum dikenakan denda keterlambatan. Akibatnya, PT PIM kehilangan potensi pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp306,51 juta.

> **Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan.**

BPK merekomendasikan kepada direksi PT PIM agar menarik denda keterlambatan sebesar Rp306,51 juta dan menyetorkannya ke kas perusahaan serta berkoordinasi dengan PT PI (Persero) terkait pengaturan denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor beserta perhitungan tarifnya.

Kemudian, pengantongan pupuk urea dan Nitrogen Phospat Kalium (NPK) yang dilakukan oleh Bagian Penanganan Produk dan Distribution Center (DC) PT Pupuk Kaltim (PKT) belum memadai, sehingga masih terdapat deviasi berat pada kemasan pupuk jenis urea maupun NPK.

Negara ataupun konsumen petani pun dirugikan karena berpotensi membayar lebih

atas deviasi tersebut. Direksi PT PKT perlu melakukan kajian untuk memodifikasi desain *conveyor* dengan menambah alat penimbangan atau melakukan perbaikan dengan meningkatkan *quality control* pengantongan pupuk bersubsidi.

BPK juga mengungkapkan, biaya administrasi umum (adum) menurut pedoman alokasi biaya seharusnya dialokasikan ke HPP produk berdasarkan alokasi nilai penjualan (omzet). Namun, pedoman juga mengatur bahwa khusus untuk biaya bunga Kredit Modal Kerja (KMK) dialokasikan dalam dua tahap, yaitu berdasarkan piutang subsidi dan non-subsidi serta berdasarkan omzet.

Penggunaan piutang sebagai dasar alokasi biaya untuk perhitungan HPP pada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang (PSP), PT Petrokimia Gresik (PKG), PT PKT, dan PT Pupuk Kujang (PK) tidak tepat karena biaya bunga KMK adalah bagian dari biaya adum. Selain itu, penggunaan omzet sebagai dasar alokasi biaya adum dan penjualan oleh PT PSP belum memperhitungkan penjualan produk selain produk utama.

Permasalahan tersebut kemudian mengakibatkan perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi tidak tepat. BPK merekomendasikan kepada direksi PT PSP, PT PKG, PT PKT, dan PT PK agar berkoordinasi dengan PT PI (Persero) untuk memperbaiki pedoman alokasi dan mekanisme pembebanan biaya bunga KMK pada HPP Pupuk Bersubsidi. Selain itu, direksi PT PSP agar mengalokasikan biaya adum dan penjualan berdasarkan nilai penjualan seluruh produk, bukan hanya produk utama.

Pedoman penyusunan tarif yang ditetapkan pemerintah belum mengatur mengenai pembebanan atas biaya perawatan prasarana Barang Milik Negara (BMN) yang tidak didanai oleh pemerintah dan Biaya Imbalan Pasca Kerja (Pensiun) pada PT KAI.

Hal itu mengakibatkan, tarif penumpang *Public Service Obligation* (PSO) terbebani Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian milik negara yang ditanggung oleh APBN. Pemerintah juga menanggung beban PSO lebih tinggi serta mengakibatkan potensi biaya perusahaan untuk memenuhi hak pegawai aktif/pegawai yang sudah pensiun tidak tertagih di dalam perhitungan PSO.

Permasalahan itu juga mengakibatkan perbedaan signifikan antara nilai asersi manajemen yang disampaikan PT KAI kepada KPA satker Kementerian Perhubungan pada akhir tahun dengan kontrak.

BPK merekomendasikan kepada direksi PT KAI agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, yaitu agar lebih intensif untuk berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal itu terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 dalam hal biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang tidak ditanggung APBN dan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik PT KAI yang dibebankan ke dalam perhitungan tarif kereta api.

BPK juga merekomendasikan agar menginstruksikan Corporate Deputy Director of Revenue and Cost Consolidation untuk menyusun konsep usulan mengenai komponen biaya yang timbul terkait imbalan pasca kerja/pensiun pegawai dan mengusulkan kepada direksi PT KAI sebagai bahan koordinasi dengan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (PM) 17 Tahun 2018.

PT Pelni menggunakan perhitungan Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri. Satu SDUM setara dengan satu penumpang ekonomi. Pemeriksaan menunjukkan perhitungan SDUM kurang memadai, antara lain karena adanya cabang yang masih membuat manifes secara manual meskipun tidak diperbolehkan. Divisi Pengelolaan PSO dan subsidi kurang teliti memasukkan jumlah muatan ke dalam perhitungan SDUM.

Akibatnya, nilai SDUM yang digunakan untuk menghitung nilai kompensasi PSO bidang angkutan laut kelas ekonomi tahun 2020 tidak akurat. BPK pun merekomendasikan kepada direksi PT Pelni agar mengintegrasikan sistem aplikasi administrasi di kapal dengan aplikasi muatan untuk pencatatan dan verifikasi jumlah muatan dan over bagasi yang diangkut oleh kapal dalam tabel silang.

Selain itu, terdapat permasalahan yakni BRI telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun belum menyalurkannya kepada debitur yang berhak sebesar Rp138,81 miliar. Selain itu, BRI juga telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga KUR atas debitur yang tidak berhak sebesar Rp49,56 miliar.

Hal itu mengakibatkan, BRI berpotensi menanggung risiko reputasi atas belum terpenuhinya hak debitur berupa tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp138,81 miliar dan pemerintah berpotensi menanggung kelebihan pembayaran tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp49,56 miliar.

BPK merekomendasikan kepada direksi BRI agar memerintahkan kepada Pemimpin Divisi Micro Business Development untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan lembaga terkait di pemerintah dalam rangka penyaluran tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp138,81 miliar kepada debitur yang berhak dan pengembalian kelebihan penerimaan tambahan subsidi bunga KUR atas debitur yang tidak berhak sebesar Rp49,56 miliar ke kas negara.

Kemudian, terdapat pemanfaatan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi tidak sesuai ketentuan, seperti rumah masih kosong (tidak berpenghuni), disewakan, dan kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain. Hal itu menimbulkan potensi kelebihan pemberian KPR Bersubsidi (subsidi selisih bunga/subsidi selisih margin) atas rumah yang tidak dihuni sejumlah 1.005 unit, rumah yang disewakan sebanyak 12 unit, rumah yang kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain sebanyak empat unit, rumah yang dihuni orang lain sebanyak 25 unit, dan rumah yang dialihfungsikan sebanyak satu unit.

BPK merekomendasikan kepada direksi BTN untuk memerintahkan Subsidized Mortgage Division Head dan Shariah Division Head untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang dilakukan Internal Audit Division serta menentukan penyelesaian sesuai dengan aturan dan surat pernyataan yang telah ditandatangani para debitur KPR Bersubsidi yang bersangkutan.

BPK juga mengungkapkan sejumlah permasalahan yang terkait dengan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Permasalahan itu yakni PT PNM mengalokasikan subsidi bunga/margin untuk pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok melalui kegiatan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kegiatan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada 2020 terdapat penyaluran subsidi bunga/margin yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu adanya nasabah meninggal, dan tidak ditemukan.

Selain itu, terdapat nasabah yang memperoleh pembiayaan lanjutan dengan jeda waktu dari penutupan pembiayaan awal, karena pengajuan data nasabah penerima subsidi bunga/margin dengan pembiayaan lanjutan tidak mempertimbangkan adanya jeda waktu antara pembukaan pembiayaan lanjutan dengan penutupan pembiayaan sebelumnya.

Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp66,79 miliar dan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh Pemerintah. BPK merekomendasikan kepada direksi PT PNM agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp66,79 miliar tersebut ke kas negara, serta menginstruksikan agar divisi terkait meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan perubahaan data terkait subsidi bunga/subsidi margin.

Kemudian, PT Pegadaian juga melaporkan telah menyalurkan subsidi bunga/margin tahun 2020 sebesar Rp108,56 miliar. Namun, pada 31 Desember 2020, dana sebesar Rp23,67 miliar masih mengendap di rekening pendamping dan belum dimanfaatkan oleh nasabah. Setelah itu, pada 31 Maret 2021 masih terdapat sisa dana mengendap sebesar Rp6,50 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan sistem pembayaran subsidi pada PT Pegadaian yang tidak dapat melakukan pendebetan otomatis terhadap angsuran nasabah dengan status lancar.

Hal ini mengakibatkan realisasi penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pada PT Pegadaian berpotensi tidak optimal dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Direksi PT Pegadaian pun direkomendasikan agar mempercepat proses penyaluran subsidi yang masih mengendap pada rekening pendamping dan belum dimanfaatkan oleh nasabah serta melaporkan perkembangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian BUMN.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan 115 temuan yang memuat 181 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 107 kelemahan sistem pengendalian intern, 66 ketidakpatuhan senilai Rp2,23 triliun, serta delapan permasalahan 3E senilai Rp104,45 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN/anak perusahaan terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp72,81 miliar. ●

PEMERIKSAAN BPK UNGKAP KELEBIHAN PEMBEBANAN *COST RECOVERY* SENILAI RP994,51 MILIAR

Biaya penyusunan FEED yang tidak digunakan sebesar 45,57 juta dolar AS tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasional dan diperhitungkan dalam *cost recovery*.

Pada semester I 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 Wilayah Kerja (WK) Berau, Muturi, dan Wiriagar (LNG Tangguh) pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau Ltd. Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama selama 2018, pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan, dan material terhadap biaya operasi pada 2018, dan biaya kantor pusat KKKS BP Berau Ltd yang dibebankan pada biaya operasi pada 2018.

Bayu Luhur Wicaksono

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai.

Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,02 juta dan 68,60 juta dolar AS atau total sebesar Rp994,51 miliar.

Hal itu di antaranya berasal dari kontrak Dual Front End Engineering Design (FEED) tidak sesuai ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007 Revisi 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan realisasi targetnya tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan biaya penyusunan FEED yang tidak digunakan sebesar 45,57 juta dolar AS tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasional dan diperhitungkan dalam *cost recovery*.

BPK merekomendasikan antara lain kepada Regional Presiden KKKS BP Berau Ltd agar melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Berau, Muturi dan Wiriagar sebesar 45,57 juta dolar AS serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

> **BPK menemukan pengadaan pipa Oil Country Tubular Goods (OCTG) sebesar 16,96 juta dolar AS tidak dapat dibebankan sebagai *cost recovery*. Ini karena justifikasi penunjukan langsung untuk barang kategori wajib yang disampaikan oleh KKKS BP Berau Ltd kepada SKK Migas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.**

Kemudian, BPK menemukan pengadaan pipa Oil Country Tubular Goods (OCTG) sebesar 16,96 juta dolar AS tidak dapat dibebankan sebagai *cost recovery*. Ini karena justifikasi penunjukan langsung untuk barang kategori wajib yang disampaikan oleh KKKS BP Berau Ltd kepada SKK Migas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi KKKS BP Berau Ltd sebesar 16,96 juta dolar AS.

BPK merekomendasikan antara lain kepada Regional Presiden KKKS BP Berau Ltd agar melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Berau, Muturi, dan Wiriagar sebesar 16,96 juta dolar AS serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai migas mengungkapkan delapan temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi tiga kelemahan SPI dan delapan ketidakpatuhan sebesar Rp994,51 miliar. ●

fitri lailaturrahmi-pexels

PELAYANAN REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN PERLU DIPERBAIKI

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun Anggaran 2019 sampai semester I Tahun Anggaran 2020. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta.

Ditjen Hubdat telah melakukan perbaikan dalam pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor. Hal itu antara lain dalam pemeriksaan kinerja pelayanan dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada 2017 diketahui terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebesar Rp386,46 miliar.

PNBP SRUT tersebut mengalami peningkatan pada 2019 menjadi sebesar Rp1,23 triliun atau sebesar 218,91 persen. Selain itu, penggunaan aplikasi E-SRUT telah membawa dampak positif yaitu mempercepat dan mempermudah penerbitan SRUT serta mengefisienkan anggaran sebesar lebih kurang Rp20 miliar per tahun dengan menghilangkan pengadaan blangko SRUT.

Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe. Hal tersebut ditunjukkan dengan permasalahan antara lain Ditjen Hubdat belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNBP SRUT. Ditjen Hubdat juga belum membandingkan antara data kendaraan bermotor yang telah mendapatkan SRUT dan laporan APM, importir umum (IU), atau karoseri mengenai data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

Selain itu, Ditjen Hubdat belum memiliki SOP atau petunjuk teknis (juknis) terkait dengan pelaporan elektronik untuk laporan APM, IU, atau karoseri mengenai data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Akibatnya, Ditjen Hubdat belum dapat mengidentifikasi secara akurat nilai PNBP SRUT yang seharusnya diterima sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan belum dapat memanfaatkan data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan sesuai dengan peraturan sebagai data pembanding atau alat kontrol penghitungan PNBP SRUT.

Selain itu, BPK mengungkap, sistem akuntansi PNBP SRUT belum memadai. Hal tersebut antara lain terlihat dari kebijakan akuntansi belum menentukan saat terutangnya PNBP SRUT, terdapat pembayaran PNBP SRUT yang tidak sesuai tarif dan terdapat perbedaan nilai PNBP SRUT dalam *Vehicle Type Approval* (VTA) *online* dan Simponi. Akibatnya, perolehan PNBP dari pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor belum optimal dan berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian saldo piutang PNBP SRUT dalam laporan keuangan Kemenhub.

Keamanan data dan informasi juga belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut antara lain terlihat dari VTA *online* belum memiliki prosedur pengendalian akses, belum memiliki rekam jejak audit, dan belum memiliki prosedur *back-up* data dan aplikasi. Akibatnya, sistem aplikasi VTA *online* akan memiliki risiko yang tinggi terhadap intrusi keamanan baik dari dalam maupun dari luar serta berpotensi kehilangan data dan informasi dari sumber yang telah diperbarui.

> **Perolehan PNBP dari pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor belum optimal dan berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian saldo piutang PNBP SRUT dalam laporan keuangan Kemenhub.**

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan antara lain untuk menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat menyusun SOP dan/atau petunjuk teknis terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaporan secara elektronik atas data produksi kendaraan bermotor oleh APM, IU, atau karoseri.

Selain itu, Menhub direkomendasikan untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mengakomodasi pengakuan dan pencatatan utang, piutang, dan pendapatan diterima di muka yang timbul dalam pengelolaan PNBP SRUT dalam aplikasi VTA *online*.

Menhub juga perlu berkoordinasi dengan Pustikom dalam rangka menyusun SOP terkait dengan prosedur pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur *back-up* data dan aplikasi pada sistem VTA *online*, serta menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan prosedur tersebut.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor mengungkapkan lima temuan yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan. ●

BPK RAMPUNGKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SENILAI RP 52,87 TRILIUN

Kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2021 adalah sebesar Rp4,16 triliun.

Rusmawan Harry Marwoto

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan pada periode 2017 hingga 30 Juni 2021. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-30 Juni 2021, BPK menyampaikan 270 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp52,87 triliun serta 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 274 kasus pada tahap persidangan.

BPK memerinci, dari 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, sembilan laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan. Sebanyak dua laporan PI dilaksanakan pada pemerintah pusat, 11 laporan pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 12 laporan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

> **Sebanyak 274 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.**

Kemudian, dari 270 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 55 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 215 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap). Dari laporan tersebut, sebanyak 47 PKN dilaksanakan pada pemerintah pusat, 185 PKN pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 38 PKN pada BUMN.

Selain itu, sebanyak 274 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU. Secara lebih detail, sebanyak 53 PKA dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, 180 PKA pada pemerintah daerah dan BUMD, dan 41 PKA pada BUMN.

IHPS I 2021 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2021 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2021 adalah sebesar Rp4,16 triliun.

Kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,15 triliun (76 persen) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2021. Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 58 persen, 54 persen, 37 persen, dan 35 persen.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2021 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp391,05 miliar (9 persen), pelunasan sebesar Rp1,76 triliun (42 persen), dan penghapusan sebesar Rp114,17 miliar (3 persen). Dengan demikian, terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,89 triliun (46 persen). ●

nataliya vaitkevich - pexels

BPK RI menerima penghargaan
sebagai Lembaga Audit Profesional dan Modern
(Kategori Politik dan Pemerintahan)
dalam GATRA AWARDS 2021,
yang diselenggarakan oleh Gatra Media Group,
pada Rabu, 1 Desember 2021.

Penghargaan ini merupakan
bentuk apresiasi
GATRA Media Group kepada
Institusi Negara dan Swasta
serta Individu atau Kelompok
yang menginspirasi masyarakat
dengan kontribusi positif berupa ide,
gagasan serta program-program
yang terealisasi selama beberapa
waktu terakhir dalam perjuangannya
memajukan Indonesia dengan memberdayakan
kemampuan atau buatan anak bangsa sendiri.

PENTINGNYA PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Manajemen pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

Dengan semakin luas dan kompleksnya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, penerapan manajemen pengetahuan menjadi hal yang amat penting. Apalagi, saat ini *stakeholders* semakin kritis terhadap hasil pemeriksaan BPK.

Hal tersebut diungkapkan Analis pengembangan kompetensi BPK Risfayanti dalam webinar Komunitas Litbang Live bertajuk "Kesiapan Pegawai Mengimplementasikan Manajemen Pengetahuan", pada akhir November. Risfayanti menjelaskan, berdasarkan beberapa literatur, manajemen pengetahuan adalah proses untuk mengidentifikasi, mendistribusikan, merekam, mengevaluasi, berbagi dan mengambil kembali dokumen, *database*, kebijakan-kebijakan, prosedur dan keahlian serta pengalaman yang belum teridentifikasi atau belum diambil dari pemilik pengetahuan tersebut.

Menurut dia, BPK sendiri sudah mendefinisikan manajemen pengetahuan.

ijeab-freepik

■ **Risfayanti**

> **Dengan manajemen pengetahuan maka pengetahuan dan aset berharga tidak hilang ketika dia pensiun.**

"BPK mendefinisikan bahwa manajemen pengetahuan adalah upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi," ungkap dia.

Secara lebih konkret, manajemen pengetahuan juga merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Tujuannya guna membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Ada beberapa aktivitas yang termasuk dalam manajemen pengetahuan BPK. Beberapa aktivitas itu, antara lain, *peer assist, after action review, retrospect, community of practice, knowledge-based interview*, KTF (kegiatan diseminasi pengetahuan), *coaching, mentoring*, diklat dan *blogging*.

"*Peer assist* ini seperti mengundang atau mengajak teman, sejawat yang telah memiliki pengetahuan untuk dibagi pengalamannya kepada sesama, atau *learning before doing*," ucap dia.

"Sementara *after action review* adalah pendekatan yang dilakukan setelah pekerjaan sehingga bisa menjadi pedoman atau direplikasi pada kegiatan serupa di masa depan," ungkap dia melanjutkan.

Risfayanti menjelaskan ada beberapa hal atau kegiatan utama yang menjadi alasan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BPK. Salah satunya adalah mutasi, di mana setiap beberapa bulan dilakukan pergeseran. "Bagi pegawai yang dimutasi, bisa jadi pegawai itu memiliki pengetahuan yang amat dibutuhkan unit kerja itu. Dengan adanya manajemen pengetahuan diharapkan tidak hilang begitu saja begitu pegawai itu mutasi," ujar dia.

Sementara bagi pegawai yang masuk ke suatu unit kerja, dengan manajemen pengetahuan yang baik, dia bisa lebih mudah untuk beradaptasi di unit kerjanya yang baru.

Hal berikutnya, ucap Risfayanti, adalah adanya pegawai yang *resign* atau pensiun di BPK. Padahal di saat yang sama, pegawai BPK membutuhkan pengetahuan dan aset berharga yang dimiliki oleh mereka yang pensiun. "Dengan manajemen pengetahuan maka pengetahuan dan aset berharga tidak hilang ketika dia pensiun," ucap dia.

Alasan penting berikutnya untuk menerapkan manajemen pengetahuan di BPK yaitu kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan. Selain itu adalah mitigasi risiko hilangnya pengetahuan, mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama, dan mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Kemudian juga kebutuhan standardisasi kompetensi SDM dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi," ucap dia. ●

BPK RI menerima penghargaan
dari Pemerintah Republik Indonesia
atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2020
dengan Capaian Opini WTP.

Penghargaan diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021
yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BPK SAMPAIKAN MASUKAN TERKAIT KONSOLIDASI ANGGARAN DI PBB

BPK telah melakukan survei kepada beberapa auditor eksternal entitas PBB. Hasilnya, menunjukkkan adanya variasi sifat anggaran dan pilihan tata kelola yang dapat mempengaruhi kebijakan kompilasi anggaran.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyampaikan perlunya penyempurnaan implementasi kebijakan akuntansi konsolidasi anggaran dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsolidasi anggaran merupakan praktik unik dalam sistem PBB. Akan tetapi, sedikit entitas PBB yang mengadopsinya.

Pendalaman atas isu ini berpegang pada IPSAS 24 tentang Penyajian Informasi Anggaran dalam Laporan Keuangan dan IPSAS 35 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi. Pertanyaan tentang konsolidasi anggaran muncul ketika suatu entitas memiliki perbedaan dasar anggaran antara anggaran yang disetujui entitas pengendali dan entitas yang dikendalikan.

Agus menyampaikan hal ini saat menghadiri "Sixty-first (2021) Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies, and the International Atomic Energy Agency". Kegiatan diselenggarakan secara fisik di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Senin (6/12).

Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan anggota UN Panel of External Auditors. Pada tahun ini, pertemuan diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Desember 2021.

Agus menjelaskan, BPK telah melakukan survei kepada beberapa auditor eksternal entitas PBB. Hasilnya, menunjukkkan adanya variasi sifat anggaran dan pilihan tata kelola yang dapat mempengaruhi kebijakan kompilasi anggaran.

"Variasi tersebut dapat dilihat pada basis anggaran yang berbeda antara entitas pengendali dan entitas yang dikendalikan serta dalam basis anggaran dan hubungan antar-entitas dalam kerangka pelaporan konsolidasi," kata Agus.

Atas permasalahan tersebut, lanjut dia, BPK mengusulkan adanya pertukaran pikiran antara para pemeriksa eksternal tentang praktik umum konsolidasi anggaran yang disyaratkan oleh IPSAS dalam sistem PBB. Pembahasan ini mencakup apakah tata kelola anggaran itu sendiri berdampak pada laporan kompilasi ulang anggaran serta persyaratan laporan keuangan konsolidasi.

Pertimbangan dalam menentukan pengungkapan yang diperlukan pada laporan anggaran akan menjadi referensi yang dibutuhkan untuk transparansi yang diinginkan. Diskusi ini diharapkan dapat membantu memperluas perspektif auditor dalam memberikan nilai tambah kepada pengguna laporan.

Hasil diskusi tersebut kemudian dapat dikomunikasikan kepada UN IPSAS Task Force untuk dapat menginisiasi kesadaran bagaimana IPSAS 24 dan IPSAS 35 diimplementasikan dalam sistem PBB. Lebih jauh lagi, pandangan UN IPSAS Task Force atas isu ini diharapkan dapat menciptakan pendekatan dan dasar yang seragam untuk melaksanakan kompilasi anggaran di bawah kerangka pelaporan terkonsolidasi untuk audit di semua organisasi PBB.

Selain BPK, 12 pimpinan auditor eksternal lain badan-badan PBB turut serta dalam pertemuan ini. Negara yang hadir antara lain Chile, Prancis, Jerman, India, Italia, Filipina, dan Tanzania. Sedangkan pimpinan *supreme audit institutions* (SAI) lain yang mengikuti panel secara virtual tersebut antara lain Inggris, Kanada, Swiss, Cina, dan Rusia.

Dalam pertemuan ini turut hadir pula secara virtual Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Kemudian hadir secara fisik Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti. ●

BPK TERPILIH SEBAGAI WAKIL KETUA UN PANEL EXTERNAL AUDITOR

SAI Chile terpilih menjadi *chair* menggantikan SAI India yang sebelumnya telah menjadi *chair* pada periode 2020 dan 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih sebagai Vice-Chair of UN Panel of External Auditors untuk masa jabatan Desember 2021 sampai dengan Desember 2022. Keputusan itu diambil melalui kesepakatan seluruh anggota panel pada hari kedua penyelenggaraan "Sixty-first (2021) Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies, and the International Atomic Energy Agency".

Acara ini diselenggarakan secara fisik di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat pada 6-7 Desember 2021. Pemilihan BPK tersebut diputuskan dalam agenda "Election of Chair and Vice-Chair of the Panel for 2022". Delegasi BPK dipimpin oleh Wakil Ketua Agus Joko Pramono.

Sementara itu, yang terpilih menjadi *chair* adalah SAI Chile yang sebelumnya menjadi *vice-chair* pada 2020 dan 2021. SAI Chile menggantikan SAI India yang sebelumnya telah menjadi *chair* pada periode 2020 dan 2021.

Berdasarkan "Rules of Procedure UN Panel of External Auditors", pejabat panel terdiri dari *chair* dan *vice-chair* yang dipilih oleh anggota pada setiap akhir sesi reguler untuk menjabat sampai akhir sesi reguler selanjutnya.

Berbeda dengan pemilihan-pemilihan keketuaan lainnya, dalam UN Panel of External Auditors, ketua dan wakil ketua dipilih berdasarkan usulan dari anggota. Anggota tidak mencalonkan diri mereka sendiri untuk dipilih.

Sementara itu, tugas *vice-chair* yaitu, pertama menyelenggarakan/memimpin rapat jika *chair* berhalangan. Kedua, mewakili panel di hadapan badan, komite, pembacaan eksekutif, dan lain-lain sesuai dengan permintaan *chair*.

Ketiga, menjalankan fungsi *chair* jika *chair* berhenti menjadi anggota panel. Berkaitan dengan tugas baru ini, BPK akan melakukan koordinasi penuh dengan SAI Chile dan anggota-anggota panel lainnya.

Dipilihnya BPK sebagai wakil ketua UN Panel External Auditor ini mempertegas peran dan kontribusi BPK di dunia internasional. Khususnya di bidang pemeriksaan. ●

WAKIL KETUA BPK BAHAS PENGEMBANGAN PERAN PEMERIKSA EKSTERNAL DI PBB

BPK berharap, keterlibatan ini menjadi bagian dari kontribusi BPK untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas global. Khususnya dalam lingkungan PBB.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengadakan pertemuan dengan UN Controller Chandramouli Ramanathan pada Senin (6/12). Pertemuan ini diselenggarakan sebagai rangkaian United Nations (UN) Panel of External Auditor yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 6-7 Desember 2021.

Sebagai pembuka materi, Agus menjelaskan keterlibatan BPK sebagai pemeriksa eksternal di beberapa lembaga internasional. Misalnya saja, International Anti-Corruption Academy (IACA) pada 2015-2017 dan 2019-2021. Kemudian International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 2016-2021 dan International Maritime Organisation (IMO) pada 2020-2023.

BPK berharap, keterlibatan ini menjadi bagian dari kontribusi BPK untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas global. Khususnya dalam lingkungan PBB.

Agus juga memberikan apreasiasi kepada Chandramouli Ramanathan. Dalam UN Panel, Ramanathan telah menyampaikan mengenai pentingnya keterlibatan pemeriksa eksternal dalam proses pengembangan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS).

Untuk itu, Agus menambahkan, perlu dipastikan ketersediaan suatu platform bersama antara UN External Auditor dengan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS Board) dan Gugus Tugas IPSAS PBB (UN IPSAS Task Force). Khususnya mengenai implementasi dan interprestasi IPSAS di lembaga-lembaga di PBB.

Agus pun berharap BPK dapat menjadi bagian dalam proses interaksi dengan IPSAS Board and UN IPSAS Task Force. Hal ini sebagai bagian dari komunitas pemeriksa eksternal lembaga internasional.

Pada akhir pertemuan, Ramanathan membuka komunikasi lebih lanjut untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga PBB. Hal ini antara lain dilakukan melalui peran BPK sebagai pemeriksa eksternal.

Dalam pertemuan ini, Agus sebagai ketua delegasi BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) B Dwita Pradana.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti dan wakil penanggung jawab Pemeriksaan Organisasi IAEA R Yudi Ramdhan, serta Executive Secretary United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN IAAC/Komite Penasihat Audit Independen PBB) Moses Bamuwamye. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Mendapatkan Penghargaan

BKN AWARD 2021

Kategori
Lembaga Negara/LPNK
Tipe A

KEPALA BPK PERWAKILAN SULAWESI UTARA, KARYADI

MENONJOLKAN MANFAAT BPK

Bagi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi, hubungan dengan entitas harus terus diperkuat untuk mendukung peningkatan akuntabilitas. Dengan pembenahan secara internal dan eksternal, Karyadi meyakini, BPK dapat semakin menunjukkan manfaat dari setiap pemeriksaannya.Kepada *Warta Pemeriksa*, Karyadi mengisahkan perjalanan karier dan strateginya dalam menghadapi *auditee*. Berikut petikan wawancaranya.

■ **Karyadi**

Bagaimana perjalanan karier Bapak hingga saat ini menjadi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara?

Saya itu sejak awal memang ingin sekali bergabung dengan BPK karena banyak teman-teman yang masuk BPK. Saya pun akhirnya berhasil masuk BPK pada 1998. Ketika mengawali karier, saat itu saya berada di era transisi.

Jadi, saya sudah tidak merasakan era koreksi dengan spidol dan justru sudah merasakan peralatan canggih seperti laptop, kamera, dan *handycam*. Karena saya mampu mengoperasikannya dan juga memiliki alat-alat itu, sering juga saya menjadi rebutan untuk melakukan pemeriksaan. Saat itu, komputer yang ada di kantor memang masih terbatas.

Pada 1998 itu, memang masa peralihan dari sistem kerja yang sangat manual menjadi lebih terkomputerisasi. Beberapa rekan saya yang lain masih ada yang mengalami kerja dengan mesin manual.

Saya melakukan tugas pemeriksaan pertama kali di Kementerian Kehutanan. Saya pernah melaksanakan pemeriksaan terkait kasus *illegal logging*. Banyak sekali temuan signifikan dalam kasus itu. Dari tugas itu, saya pernah mendapatkan penghargaan Wirakarya pada 2005.

Setelah delapan tahun memeriksa Kementerian Kehutanan, saya berpindah ke pemeriksaan di Bank Indonesia pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II. Masih pada 2006, saya kemudian dimutasi ke Papua dan dipromosikan ke Riau untuk menjadi Kasubbag Keuangan. Itu cikal bakal saya beralih profesi dari auditor menjadi penunjang. Memang saat itu BPK sedang gencar-gencarnya berkembang termasuk melakukan pembukaan kantor perwakilan salah satunya di Riau.

Setelah bertugas di BPK Perwakilan Riau, saya dipercaya untuk bertugas di Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal pada 2009. Saat itu, saya ikut serta melaksanakan modernisasi sarana dan prasarana kantor di seluruh Indonesia.

> **Menurut saya, BPK juga terus mengalami perubahan yang positif. Perubahan-perubahan itu terus ditorehkan oleh para pimpinan BPK.**

Selanjutnya, saya dipercaya menjadi Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) AKN IV yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2013. Dulu, sangat tidak diperbolehkan seseorang menjalani pemindahan dari penunjang ke teknis atau sebaliknya. Artinya, karier pegawai harus sesuai dengan jalurnya. Akan tetapi, saya diberi kesempatan dan kembali menjadi pemeriksa.

Pada 2015, saya dimutasi menjadi Kasubaud BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah itu, pada 2017, saya kembali ke pusat dan menjadi Kasubaud AKN VI yang membawahi pendidikan.

Kemudian, saya mengikuti *bidding* dan dipercaya menjadi Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2018. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, saya merintis jalan membangun kantor BPK Perwakilan di daerah tersebut. Selanjutnya dan hingga saat ini, saya dipercaya untuk memimpin BPK Perwakilan Sulawesi Utara.

Apa yang membuat Anda ingin bekerja di BPK?

Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan akuntansi. Saat kuliah, nilai audit saya itu cukup bagus.

Memang, dalam pelajaran pengantar akuntansi saya masih kalah dengan anak-anak lulusan SMEA. Saya adalah lulusan SMA jurusan IPA. Tapi, setelah mulai masuk semester kelima dan mulai masuk praktik audit saya mulai menang.

Saya ternyata senang mengaudit. Kemudian, saya memberanikan diri tes di BPK. Hal yang membuat saya senang dari BPK adalah karena bisa membuat orang menjadi lebih baik.

Menurut saya, BPK juga terus mengalami perubahan yang positif. Perubahan-perubahan itu terus ditorehkan oleh para pimpinan BPK. Saya kira kita harus akui itu dan sebagai generasi penerus kita perlu berterima kasih dengan adanya semangat yang mampu mendobrak BPK itu.

Organisasi terus diperbaiki, ada penataan internal, dan kemudian ada perbaikan pendapatan juga. Termasuk juga soal fasilitas BPK Perwakilan. Saya kira, kita semua sudah memiliki standar sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Sampai sekarang pun BPK terus maju dan itu dilakukan supaya kinerja BPK bisa menjadi lebih baik.

Bagaimana karakter Bapak dalam memimpin suatu organisasi?

Kalau saya sebetulnya mengalir saja. Saya itu dari kampung, dari Solo. Bisa tembus nasional itu sudah prestasi tersendiri.

Saya sering menantang kawan-kawan untuk bertanya apa yang bisa saya persembahkan kepada BPK? Tentunya, masing-masing harus punya kontribusi sekecil apapun itu.

Bagi saya, kontribusi ke BPK itu bisa dilakukan dalam dua hal yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, maka saya harus membenahi ke dalam. Membenahi bukan berarti menerjang atau menghambat program pimpinan. Justru harus kita dorong karena keinginan pimpinan itu sebetulnya sama dengan keinginan kita semua. Hanya saja, perlu ada strategi untuk mengkomunikasikan arahan tersebut hingga ke level yang paling bawah.

Dengan penguatan internal maka itu akan mendukung upaya penguatan eksternal yakni dengan *branding* BPK. Artinya, pegawai BPK itu akan dikenal sebagai orang-orang yang modern dan canggih. Jadi jangan *malu-maluin*.

Sebagai contoh, ketika pertama kali saya bertugas di BPK Perwakilan Sulawesi Utara itu pengisian Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) baru mencapai 9 persen. Artinya, bertahun-tahun itu tidak diinput.

Seharusnya, setelah pemeriksaan itu kita melaporkan pekerjaan ke dalam sistem. Saya masuk BPK Perwakilan Sulawesi Utara pada Juli 2019. Kemudian, pada September, saya minta teman-teman untuk memperbaiki itu.

Contoh secara eksternalnya terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ketika saya awal bertugas di Sulawesi Utara tingkat tindak lanjut itu sekitar 56 persen.

Saya kemudian berusaha memperkuat komitmen dari *auditee* dan bahkan kami buatkan *template* serta diarahkan. Dengan upaya itu, tingkat tindak lanjut bisa naik menjadi 79 persen dan sedikit lagi sudah akan mencapai 80 persen hingga semester I 2021.

Saya kira ini faktor budaya juga. Bukan dengan memaksa tapi harus diarahkan dan ada penguatan komitmen. Para kepala daerah kita ajak untuk membuat komitmen dan bahkan ditandatangani dalam sebuah seremoni.

■ **Karyadi**

> **Target saya utamanya, ketika kita keluar dari BPK Perwakilan Sulawesi Utara, orang akan mengenal kita sebagai orang yang mampu bekerja secara sistematis dan memiliki semangat juang tinggi.**

Dampak apa yang Anda harapkan dari peran Anda sebagai kepala perwakilan?

Saya mendengar ini dari teman-teman bahwa kepala daerah itu menganggap BPK sangat angker. Mungkin anggapan itu muncul karena kita tidak pernah datang atau seperti tidak peduli terhadap entitas.

Karakter saya itu, saya berusaha dekat. Dekat dalam arti mencoba menggali pendekatan dan memperoleh masukan untuk BPK. Sekarang kita ubah itu.

Kita berusaha menekankan bahwa BPK berupaya memberikan manfaat kepada entitas. Misalnya, apabila ada temuan yang menyangkut pihak ketiga. BPK kemudian akan meminta uang untuk dikembalikan ke kas daerah. Jadi, bukan ke BPK. Dengan demikian, semestinya pemerintah daerah yang justru perlu mendukung BPK.

Kalau misalnya, mereka justru menghambat atau mempersulit justru kita bertanya-tanya. Saya kira dengan pendekatan itu akhirnya entitas bisa memahami peran BPK.

Untuk teman-teman di BPK Perwakilan Sulawesi Utara, saya ingin mereka memiliki kebanggaan bekerja di BPK. Teman-teman yang sudah lama di BPK masih memiliki semangat kerja yang tinggi. Mereka harus memberikan contoh terutama untuk yang baru-baru. Minimal dukung saya untuk membimbing anak-anak itu menjadi generasi penerus yang mungkin nanti di masa depan akan menjadi pemimpin BPK.

Saya berusaha teman-teman itu mengerti dengan pekerjaan dan tugas masing-masing. Syukur-syukur mereka bisa berprestasi. Tapi, target saya utamanya, ketika kita keluar dari BPK Perwakilan Sulawesi Utara, orang akan mengenal kita sebagai orang yang mampu bekerja secara sistematis dan memiliki semangat juang tinggi.

Apa pesan yang ingin Anda sampaikan untuk BPK?

Saya kira visi dan misi BPK sudah jelas. Tentunya pemeriksaan kita harus memberikan manfaat. Tapi realisasinya bagaimana?

Oleh karena itu, kita harus menegaskan manfaat BPK itu bagi entitas. Promosi dan *branding* BPK harus terus kita sosialisasikan.

Bukan hanya soal kerugian daerah tapi juga bentuk-bentuk pencegahan dan edukasi. Transparansi dan akuntabilitas itu harus ditegakkan di semua lini. ●

www.bpk.go.id

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

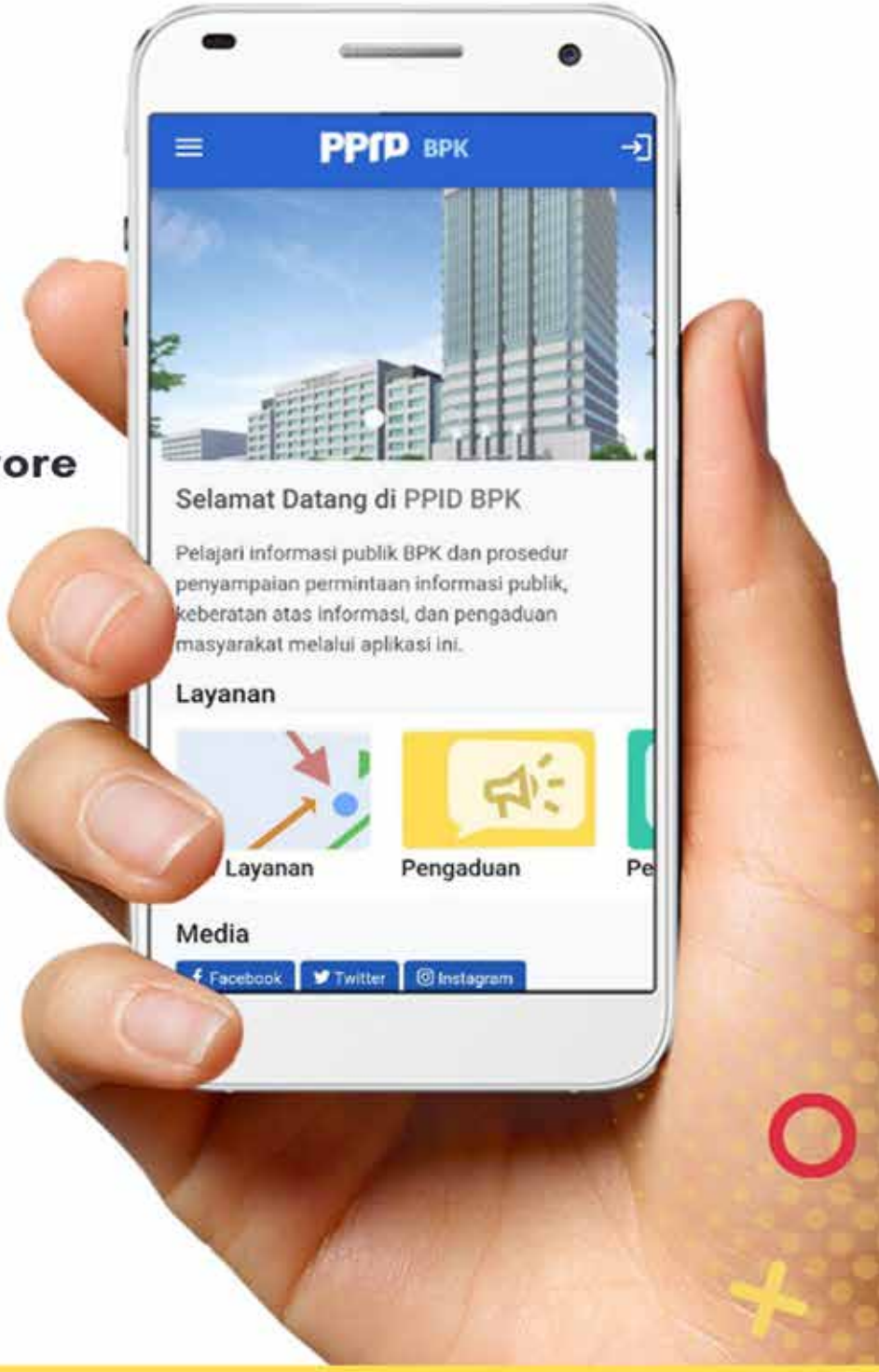

Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!

PENELITI PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA, ZAENUR ROHMAN

PEREMPUAN BISA MEMBAWA PERUBAHAN

ugm.ac.id

■ **Zaenur Rohman**

Peran perempuan di dalam berbagai aspek di Tanah Air, termasuk di dalam pemerintahan dan politik, dinilai harus terus ditingkatkan. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, keterlibatan perempuan dapat membawa perubahan yang lebih baik, tak terkecuali dalam hal pemberantasan korupsi. Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Zaenur Rohman.

> **Indonesia dalam perspektif saya sangat membutuhkan perempuan, sehingga perempuan sepatutnya diberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih, terutama dalam mengambil kebijakan publik.**

Bagaimana pandangan anda mengenai peran perempuan dalam upaya pencegahan tindak korupsi?

Pertama yang ingin saya katakan, sayangnya hingga kini masih banyak perempuan yang terjerat dalam lingkaran kasus korupsi. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya perempuan, bahkan dalam usia yang relatif masih muda menjadi pesakitan, menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana kasus korupsi. Hal ini menandakan korupsi telah merasuk ke dalam semua lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pelaku terdiri atas hampir semua kalangan, bahkan dari kalangan perempuan. Namun demikian, menurut saya perempuan memiliki peluang yang besar untuk membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih bersih.

Menurut Anda, apa yang membuat perempuan memiliki peluang untuk membawa perubahan bagi bangsa?

Hal itu karena fitrah perempuan ingin membawa kehidupan yang lebih baik. Karena, perempuan dengan jiwa nurani apalagi seorang ibu, selalu menginginkan masa depan yang terbaik bagi generasi selanjutnya atau putra-putrinya kelak. Artinya, generasi yang akan datang harus meraih masa depan yang lebih baik, bebas dari korupsi, Indonesia yang berintegritas.

Pemimpin perempuan juga memiliki karakteristik berbeda dengan pemimpin laki-laki. Perspektif perempuan dengan segala pengalaman dan riwayatnya, akan jauh lebih merawat Indonesia untuk menjadi lebih baik. Indonesia dalam perspektif saya sangat membutuhkan perempuan, sehingga perempuan sepatutnya diberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih, terutama dalam mengambil kebijakan publik. Atau bahkan menjadi para pengambil kebijakan publik, pimpinan lembaga, pemerintah, masyarakat, sehingga tercapai visi untuk lebih merawat dan melindungi Indonesia.

Karena saat ini masyarakat cenderung patriarki, kebijakan publiknya didominasi laki-laki, dimana kenyataannya kalau kita lihat belum merawat Indonesia. Selain itu, di masyarakat, patriarki cenderung belum memberikan ruang bagi perempuan dalam kebijakan publik.

Jadi, ada dua keseimbangan. Pertama, masih ada perempuan yang juga terjerat korupsi yang menandakan korupsi sudah menjalar ke semua lini. Di sisi lain, perempuan dengan nalurinya berpotensi membawa perubahan Indonesia yang lebih baik.

Apakah memang saat ini ruang atau keterwakilan perempuan masih belum cukup?

Masih sangat kurang menurut saya keterwakilan perempuan dalam politik. Benar sudah ada anggota dewan, ada menteri, direksi maupun kepala daerah perempuan, namun dilihat dari persentase masih minoritas. Selain itu, kultur politiknya masih sangat maskulin dan didominasi budaya patriarki. Walau pemimpin atau kepala daerahnya perempuan, namun pengambil kebijakan intinya masih didominasi laki-laki.

Misalnya dari partai politiknya, atau politik pemerintahan daerahnya, itu didominasi laki-laki.

Sehingga, kadang kita tidak bisa melihat kebijakan yang properempuan meskipun kepala daerahnya, kepala lembaga atau menterinya adalah perempuan.

Memang tidak menjamin bahwa pemimpin perempuan akan memiliki visi yang mengedepankan hak-hak perempuan, akan tetapi setidaknya kemungkinan itu jauh lebih besar, daripada sejak awal tidak ada keterwakilan yang cukup. Termasuk dalam bidang legislatif, keterwakilan perempuan masih sangat minoritas daripada yang semestinya. Sehingga, menurut saya politik yang sangat maskulin, lekat dengan budaya patriarki, dan didominasi kaum laki-laki saat ini jauh dari visi yang ingin merawat Indonesia.

Lalu, apa solusi agar perempuan bisa berperan lebih dalam upaya pencegahan korupsi?

Pertama, keterwakilan perempuan dalam pengambil kebijakan publik. Kita harus terus mendorong agar perempuan turut serta dalam menduduki jabatan publik. Kedua, tentu dari sisi peraturan harus didorong atau ada afirmasi atau *affirmative action*, agar keterwakilan perempuan pada jabatan publik bisa naik.

Ketiga, menurut saya, perempuan yang sudah ada di jabatan publik wajib memiliki visi Indonesia yang bersih dari korupsi. Jadi posisinya di jabatan publik tidak sekadar hanya ada perempuan, atau tokenisme. Namun, perlu membawa kebijakan-kebijakan yang properempuan dan harus sejak awal memiliki nilai integritas yang baik dan menghindari korupsi.

Alasannya, karena posisi mereka masih minoritas dan diharapkan memiliki peran yang harus dioptimalkan jangan sampai mereka yang masih minoritas ini malah terjerat kasus-kasus korupsi. Sehingga nantinya semakin mengurangi atau bahkan menghilangkan peran perempuan dalam posisi pengambil kebijakan publik.

Selain itu, apabila wakil-wakil perempuan terjerat korupsi juga menimbulkan stigma buruk. Stigma buruknya adalah adanya suara yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya kepemimpinan dan integritas laki-laki dan perempuan. ●

BPK TERUS DORONG PEMANFAATAN *BIG DATA ANALYTICS*

Inisiasi pengembangan BDA di BPK, telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan *big data analytics* (BDA). BPK pun menggelar Workshop Big Data Analytics untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemeriksa Ahli Utama pada Senin (6/12).

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja BDA Laode Nusriadi mengatakan, kegiatan *workshop* ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam *business case* pengembangan dan pemanfaatan BDA di BPK.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 2020, di antaranya meliputi pengembangan *grand design* BPK Big Data Analytics (Bidics), inisiatif strategis, pembentukan pokja, laboratorium Bidics, pengumpulan data, serta *piloting* Bidics untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta pemeriksaan strategis atau tematik.

"Mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, *workshop* ini terutama dimaksudkan untuk mensosialisasikan *grand design* Bidics, hasil-hasil *analytics* dan data-data yang telah diperoleh sebagai bagian penting dalam mewujudkan *data literacy*, *data fluency*, dan *data culture* di BPK," ungkap Laode dalam sambutannya di workshop tersebut.

Selain itu, Laode mengatakan, kegiatan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi area pengembangan dan pemanfaatan Bidics untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

Laode menyampaikan, inisiasi pengembangan BDA di BPK, telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit. Pengenalan ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pada periode 2010-2011 untuk memperoleh komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit tersebut. Kemudian, dalam rentang 2011 hingga 2019,

BPK telah mengimplementasikan pemeriksaan dengan memanfaatkan *big data*. Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

Penerapan inisiatif strategis juga didukung dengan membentuk laboratorium yang menjadi salah satu kelengkapan terutama untuk mendorong peningkatan *data literacy* dan *data fluency* untuk membentuk *data culture*. "Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk menuju *data driven organization*," ujar Laode.

> ***Workshop* ini terutama dimaksudkan untuk mensosialisasikan *grand design* Bidics, hasil-hasil *analytics* dan data-data yang telah diperoleh sebagai bagian penting dalam mewujudkan *data literacy*, *data fluency*, dan *data culture* di BPK.**

■ **Laode Nusriadi**

■ **Wisnu Djatmiko**

Selain itu, keberadaan laboratorium akan memberikan kemudahan bagi pemeriksa untuk memahami, mengakses, mengolah, dan menghubungkan data dari berbagai sumber serta dalam berbagai bentuk. Proses tersebut juga akan meningkatkan kemampuan pemeriksa untuk mengekstraksi suatu pola atau informasi berharga dari kumpulan data dan mengkomunikasikannya dengan percaya diri. Laode berharap akan terbentuk kebiasaan untuk menggunakan data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menggunakan data hasil *analytics* untuk memperkuat keputusan yang diambil.

"Peningkatan hal tersebut akan membentuk BPK menjadi *data driven organization* sehingga seluruh gerak dan langkah pengambilan keputusannya bukan hanya berasal dari intuisi tapi juga hasil analisis data yang rasional, terpadu, dan menyeluruh," ujarnya.

Meski begitu, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi BPK dalam penerapan Bidics. Hal itu antara lain *data security*. Misalnya, data diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Untuk mengantisipasi hal itu, diperlukan penyusunan naskah dinas kebijakan pengelolaan, *sharing*, dan *level user access*.

Kemudian, ada pula tantangan *data privacy* terkait dengan penyalahgunaan data sensitif seperti data pribadi. Hal ini dapat diminimalisasi dengan penguatan kerangka hukum untuk menjamin pengelolaan informasi sensitif.

Ketiga, terkait biaya yaitu ketidakpastian kebutuhan anggaran dalam pengembangan BDA. "Tidak mudah untuk memproyeksikan kebutuhan data dan infrastruktur yang diperlukan. Untuk mengurangi ketidakpastian itu, kita lakukan monitoring dan evaluasi berkala serta melakukan pengukuran kinerja BDA dengan *north star metric*," ujarnya.

Terkait masalah *bad data* atau kegagalan *sharing data* antarunit dan antarinstansi, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. Hal itu yakni pengaturan teknis *sharing internal* sebagai turunan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020. Kemudian, pengukuran kinerja satker atas BDA dan pembuatan nota kesepahaman dengan instansi pemilik data.

■ **Pranoto**

Kemudian, terdapat tantangan *bad analytics* yang terkait dengan kegagalan pengembangan model *analytics*. Menurut Laode, BPK dapat melakukan *data analytics challenge* sebagai agenda tahunan. Selain itu, BPK juga dapat mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pihak ketiga yang kompeten lainnya.

Guru Besar Universitas Indonesia Bidang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dan Robotika Wisnu Djatmiko mengatakan, tantangan yang cukup krusial dalam pengembangan BDA adalah isu keamanan dan regulasi. Menurut Wisnu, keamanan data harus diperkuat agar tidak ada *security breach* atau *privacy breach*.

Kemudian, terkait regulasi, Wisnu menyampaikan, tata kelola data mengacu pada kebijakan dan prosedur yang diadopsi untuk mengelola data dalam suatu organisasi. Kerangka kerja tata kelola *big data* diperlukan untuk mengelolanya dalam suatu organisasi.

"Hal itu bisa terwujud dengan menerbitkan regulasi *big data governance* sesuai standardisasi yang ada," ujarnya.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto mengatakan, pihaknya telah mengembangkan *dashboard* Bidics. Dia menjelaskan, secara prinsip, seluruh proses *analytic* akan dilakukan dari berbagai aplikasi yang sudah ada di BPK.

"Prinsipnya, seluruh sistem informasi itu menghasilkan data. Baik data yang terstruktur, semiterstruktur, dan nonterstruktur. Itulah nanti yang akan dilakukan *data processing* dan akan dioptimalkan pemanfaatannya dalam *data analytic* yang ditampilkan di *dashboard*," ujarnya.

Pranoto mengatakan, berbagai data dari sistem informasi akan mengalir dan dilakukan proses *analytic*. Hal itu kemudian menjadi kesatuan dan tervisualisasi dalam *dashboard*.

"Apabila hal ini dilakukan dengan lebih baik ini akan sangat memabntu cakupan pemeriksaan kita atas *assurance* suatu laporan," ujarnya.

Plt Kepala Badiklat PKN Gunarwanto mengatakan, paparan para narasumber dapat memberikan pemahaman bagi para peserta *workshop* tentang Bidics dan manfaatnya dalam menunjang pekerjaan-pekerjaan di BPK. Oleh karena itu, peserta diharapkan dapat mengeksplorasi lebih lanjut hasil-hasil Bidics yang telah ada saat ini, serta memperkaya *model analytics* yang sudah ada dan mengoptimalkan Bidics dalam seluruh proses bisnis BPK. ●

Majalah Warta Pemeriksa Edisi Maret 2020
mendapatkan penghargaan

SILVER WINNER

PR Indonesia Awards 2021

untuk Kategori Lembaga
Sub Kategori Media Cetak

GERAKAN PEREMPUAN MENCEGAH KORUPSI

Pada Februari 2019, SPAK menjadi sebuah organisasi yang mandiri dengan nama SPAK Indonesia.

Gerakan ini berawal dari sebuah ide bahwa ibu atau perempuan bisa menjadi tokoh sentral dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Ide ini yang kemudian melahirkan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK). Awalnya, anggota gerakan ini terdiri dari para perempuan di timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi kini, agen SPAK ada di hampir semua provinsi di Indonesia.

SPAK berdiri pada 22 April 2014 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian ini berdasarkan pula dari studi yang dilakukan oleh KPK pada 2012-2013 di kota Solo dan Yogyakarta. Hasilnya menyebutkan bahwa hanya 4 persen orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak.

"Kejujuran dalam hal ini bukan sekedar definisi kata, tetapi bagaimana perilaku itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil studi tersebut cukup mengkhawatirkan, karena peluang lahirnya perilaku koruptif yang kemudian mendorong munculnya korupsi semakin besar," kata inisiator dan fasilitator SPAK di KPK, Yuyuk Andriati Iskak kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Ketika itu, kata dia, KPK dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melihat sosok ibu atau perempuan memiliki peluang terbesar untuk menjadi tokoh sentral dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi. Pertama, karena ibu adalah peletak nilai-nilai moral dalam keluarga. Kedua, karena perempuan memiliki kesempatan sosial yang besar, sehingga dapat menyampaikan hal-hal baik kepada lingkungannya.

Dia menambahkan bahwa ciri khas gerakan ini terletak kepada cara penyampaian nilai-nilai antikorupsi dengan menggunakan permainan dan pemakaian atribut yang menjadi pembeda para anggota gerakan. Cara ini membuat pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan menjadi sangat fleksibel dan tidak kaku. Ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang menarik yang membuat mereka yang belajar tidak hanya mendapat pengetahuan, tetapi juga punya keberanian untuk berubah.

"Dalam perjalanannya, SPAK pernah meraih capaian memenangkan penghargaan International Anti-Corruption Excellence Award (ACE Award) untuk kategori Anti-corruption Youth Creativity and Engagement," ujar dia.

Agen Pertama

Usai terbentuk, ungkap Yuyuk, SPAK kemudian melatih 25 orang perempuan NTB sebagai agen SPAK pertama. Mereka terdiri dari para ibu Dharmawanita, guru, PKK, dan aktivis perempuan. Tidak disangka, para agen ini cepat bergerak dengan penuh semangat di wilayah masing-masing dengan menggunakan alat bantu berupa permainan. Pada saat itu, permainan SPAK hanya ada di acara arisan.

Menurut Yuyuk, nama SPAK mulai dikenal usai melakukan aksi membentangkan spanduk raksasa yang dilakukan oleh 7 pemanjat tebing perempuan di gedung KPK lama untuk memperingati ulang tahun pertama. Pada 2015, Gerakan SPAK mulai merambah ke berbagai provinsi dan menambah agennya dari berbagai latar belakang.

Pada tahun ini pula, dilatih 50 agen Semai (Sembilan Nilai Antikorupsi) yang terdiri dari anak-anak usia 9-13 tahun di Makassar. Para agen Semai di bawah bimbingan agen SPAK Makassar ini

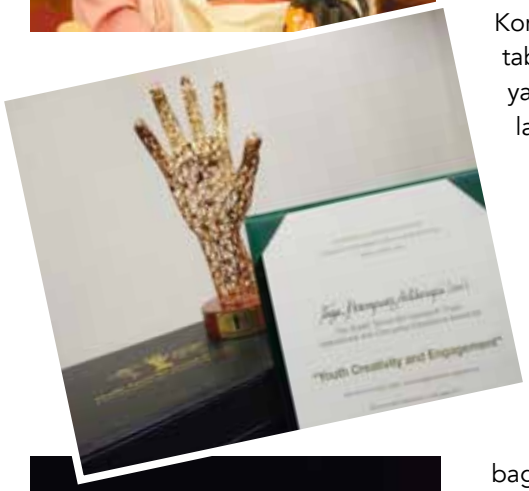

menyebarkan sembilan nilai antikorupsi kepada teman-temannya di sekolah dan lingkungan rumah mereka.

Berbagai perubahan perilaku para agen SEMAI pun sudah tercatat. Tiga penghargaan diperolah Gerakan SPAK pada 2015, antara lain rekor MURI untuk "Bermain Semai terbanyak", rekor MURI untuk "Bermain Majo Yunior terbanyak", dan Indonesia Public Relation Awards (Ipras) sebagai program pemerintah terinspiratif.

Pada ulang tahun kedua, ujar Yuyuk, diperingati dengan memancarkan logo gerakan ini di Tugu Monas. Pada tahun ini pula Gerakan SPAK merambah ke 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah agen mencapai lebih dari seribu orang dan telah memberikan pendidikan antikorupsi kepada lebih dari satu juta orang.

Dharmawanita dari beberapa kementerian dan Lembaga juga mulai mengirimkan anggotanya untuk ikut dalam pelatihan agen SPAK. Seperti Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Sekretariat Negara.

Memasuki usia ketiga, ujar dia, SPAK mulai memperkuat jaringan melalui kolaborasi dengan beberapa pihak. Seperti BRI untuk mencetak kartu Brizzi berlogo SPAK dan Cineplex XXI untuk memutar iklan layanan masyarakat bertema antikorupsi di bioskop jaringannya di seluruh Indonesia. Kemudian organisasi Kompak untuk meluncurkan permainan Trata (Transparan, Akuntabel dan Tepat Guna) dengan tujuan mengawal dana desa yang bersih dari korupsi dan musisi muda untuk meluncurkan lagu SPAK.

"Pada tahun ini pula Gerakan SPAK mulai diperkuat dengan masuknya para polwan dari Polda Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Polresta Solo menjadi agen, serta kelompok masyarakat dengan disabilitas," ucap dia.

Yuyuk menjelaskan, agen SPAK memiliki semangat tanpa henti menyebarkan pendidikan antikorupsi di mana pun. Dengan berbagai perubahan yang dilakukan, baik secara individu maupun sistem, membuka mata dunia bahwa perempuan Indonesia sungguh mampu menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mencegah korupsi.

Pada usianya keempat, Gerakan SPAK telah mengembangkan jejaring ke berbagai institusi. SPAK menjadi bagian dari program pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Kemudian menyusul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perhubungan yang turut mencetak agen-agen SPAK untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi.

"Catatan perubahan perilaku pun semakin banyak terkumpul. Bermunculan para agen SPAK yang menjadi pembaharu di lingkungan kerjanya. Mereka dengan berani membuat perubahan sistem untuk menutup celah korupsi," ungkap Yuyuk.

Pada tahun ini pula diluncurkan permainan baru, yaitu Sidaka (Korupsi dalam Perkawinan Anak). Ini merupakan permainan untuk mengajak masyarakat mengenali perilaku koruptif dan korupsi yang menimbulkan terjadinya perkawinan anak. "Bagi teman-teman dengan disabilitas, SPAK juga meluncurkan permainan yang telah ada dapat diakses oleh netra dan tuli," tambah dia.

Memasuki usia kelima, pada Februari 2019 SPAK menjadi sebuah organisasi yang mandiri dengan nama SPAK Indonesia. Padahal pada awalnya merupakan bagian dari program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Organisasi ini pun akan memastikan Gerakan SPAK terus berkelanjutan dan berkembang.

"Meski telah berdiri sendiri KPK sebagai lembaga yang turut melahirkan SPAK tetap memberikan dukungan dengan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan SPAK maupun KPK," papar dia.

Menjadi Agen SPAK

Yuyuk menjelaskan, agen SPAK merupakan perempuan dari berbagai latar belakang. Mulai dari guru, PNS, pegawai swasta, mahasiswa, LSM, jaksa, hakim, polwan, kowad, organisasi agama, PKK, aktivis perempuan, dharmawanita, bhayangkari, perangkat desa, panitera, pengacara, disabilitas, akuntan, ibu rumah tangga, dan sebagainya. "Bagi mereka yang ingin menjadi agen SPAK, harus

Meski telah berdiri sendiri KPK sebagai lembaga yang turut melahirkan SPAK tetap memberikan dukungan dengan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan SPAK maupun KPK.

mengikuti pelatihan *training of trainer* yang diadakan oleh KPK bersama AIPJ selama tiga hari," tambahnya.

Sebagai agen SPAK, maka para anggota wajib melakukan sosialisasi antikorupsi. Pada saat yang sama, agen SPAK juga menggunakan alat bantu berupa permainan untuk mengenalkan tentang apa kejahatan korupsi, dampak, dan bagaimana membentengi keluarga dari perilaku koruptif.

"Ada lima alat bantu/*games* yang digunakan untuk sosialisasi antikorupsi yang masing-masing memiliki segmen berbeda. Agen akan memandu permainan dan berdiskusi dengan peserta yang lain. Cara unik ini akan memudahkan pemahaman orang tentang apa itu korupsi," ungkap Yuyuk.

Meski sudah berdiri sendiri, dia menambahkan, namun harapan dari insan KPK tetap ada. Dia pun terus berharap gerakan ini bisa melahirkan perubahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat.

Sampai saat ini telah tercatat cukup banyak dampak dari gerakan SPAK. Yang utama adalah perubahan perilaku. Misalnya berhenti menggunakan kendaraan dinas, tidak lagi memberi hadiah pada guru atau atasan, menolak proyek yang sarat korupsi, menolak membayar petugas kelurahan dan polisi lalu lintas. "Itu adalah sebagian contoh perubahan perilaku yang dialami para agen dan orang-orang yang telah dipengaruhi," kata Yuyuk. ●

PENDAPAT BPK

Definisi

✓ Pendapat BPK adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.

✓ Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kriteria Pemberian Pendapat BPK

a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berdampak luas.
c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.
d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

Sumber Pendapat BPK

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK.

✓ Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua jenis:
   a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat.
   b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).

BPK ALAMI KEMAJUAN SIGNIFIKAN DALAM DUA TAHUN

Selama masa pandemi BPK mampu melewati bahkan memutakhirkan teknik pemeriksaan. Dengan begitu seluruh pemeriksaan *mandatory* selalu diselesaikan secara terbaik dan tepat waktu.

● Ketua BPK Agung Firman Sampurna membuka Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2021 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 17 Desember 2021. Raker dihadiri Pimpinan BPK RI secara luring maupun daring.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami kemajuan signifikan yang tidak pernah terbayang sebelumnya dalam dua tahun terakhir. Puncak dari kemajuan itu adalah pengakuan internasional atas kompetensi BPK.

"Saat ini tercatat dalam sejarah hanya BPK satu-satunya SAI yang menduduki dua jabatan sekaligus di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang audit," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Raker Pelaksana BPK tahun 2021 yang digelar 17 Desember 2021.

Selain itu, ungkap dia, wakil ketua Agus Joko Pramono juga ditunjuk menjadi wakil ketua Audit Internal PBB, United Nations Independence Advisor Comittee. Selain itu lewat tim yang dipimpin wakil ketua, BPK juga menjabat sebagai vice chair UN Panel External Auditor 2022. "Tahun ini BPK juga memimpin SAI 20 sebagai *engagement group* G20," ungkap dia.

■ **Agung Firman Sampurna**

> **Saat ini tercatat dalam sejarah hanya BPK satu-satunya SAI yang menduduki dua jabatan sekaligus di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang audit.**

Ditambahkan, sebagai rasa syukur atas raihan itu BPK wajib melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu bisa dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi individu BPK.

Dalam pembukaan raker yang mengusung tema "Bersama Melangkah untuk BPK Tangguh dan Indonesia Maju" tersebut, Agung juga menjelaskan mengenai tantangan besar saat menghadapi pandemi Covid-19. Seperti, industri yang mendapat tekanan hebat dan tempat usaha yang tutup.

Artinya, kata dia, pandemi Covid-19 sudah menjadi krisis kesehatan yang berekskalasi menjadi krisis ekonomi dan sosial. Akan tetapi pada saat yang sama pandemi juga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif, *agile*, lincah, adaptif, dan tangguh dari sebelumnya. Pada masa ini juga BPK menjadi lebih tangguh dan berkembang.

Bahkan, ujar Agung, selama masa pandemi BPK mampu melewati bahkan memutakhirkan teknik pemeriksaan. Dengan begitu seluruh pemeriksaan *mandatory* selalu diselesaikan secara terbaik dan tepat waktu.

"Selama masa pandemi ada 12 penghargaan tingkat nasional yang diraih BPK. Seperti peringkat I BKN Award, terbaik 1 Anggota JDIH kategori Lembaga Negara, Anugerah Badan Publik Informatif, dan lainnya," ucap dia.

Di tingkat internasional, BPK juga tak hanya hadir sebagai peserta ataupun penyelenggara acara. Akan tetapi juga sebagai *driving force* dalam lingkup kelembagaan dalam ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI, dan PBB.

Pada saat yang sama, BPK juga melakukan inovasi organisasi, seperti memenuhi peran sebagai SAI, yaitu *oversight, insight*, dan *foresight* sesuai Renstra BPK 2020-2024. BPK juga melahirkan pendapat dalam bentuk *strategic foresight* yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19". Melalui buku itu, BPK menyampaikan empat skenario masa depan pascapandemi Covid-19.

"*Strategic foresight* sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 dan dirilis kepada seluruh pemangku kepenting-

an pada 21 Oktober 2021. BPK merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang telah meraih kapasitas *foresight*," ucap Agung.

Pada saat yang sama, BPK juga dalam proses membentuk Badan Layanan Umum. Ini merupakan unit pengelola keuangan atas PNBP yang diperoleh BPK yang utamanya dari layanan pemeriksaan organisasi internasional.

"Seiring dengan peningkatan pemeriksaan internasional, proses yang sedang berlangsung di Kementerian PANRB dan Kementerian keuangan harus dikawal agar bisa berfungsi pada tahun 2022," ucap dia.

Agung mengingatkan, BLU bukan unit kerja tambahan. Akan tetapi metode untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel. Karenanya, pelaksanaan pemeriksaan tetap dilakukan oleh AKN-AKN terkait.

■ **Isma Yatun**

■ **Achsanul Qosasi**

Ketua BPK menambahkan, tema raker sejalan dengan arah kebijakan BPK dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan tata kelola organisasi melalui dua perspektif sekaligus. Dua perspektif itu yakni *inward looking* (bagi BPK Tangguh) dan *outward looking* (bagi Indonesia Maju).

"Dengan demikian, kehadiran BPK semakin dirasakan manfaat dan nilai tambahnya serta terus *stay relevant* dengan amanat konstitusi dan harapan pemangku kepentingan," ujar ketua BPK.

Agung mengungkapkan, tema ini diharapkan dapat mengobarkan api semangat pelaksana BPK dalam melakukan refleksi untuk menggali *lessons learned* dari capaian dan kinerja 2021. Serta menentukan prioritas kegiatan BPK pada 2022. Selain itu, juga diharapkan dapat menyelaraskan dan menyamakan persepsi terkait isu-isu strategis dan permasalahannya. Termasuk memantapkan perencanaan tahunan dan perencanaan kinerja melalui optimalisasi sumber daya dan kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan bahwa untuk menyikapi tantangan dan harapan baru ke depan, BPK harus merespons dengan menciptakan lingkungan dan cara kerja baru yang semakin adaptif. Untuk itu, ketua BPK menekankan agar sinergi dan kolaborasi terus dikembangkan dengan memperhatikan tiga aspek, yakni *change management, knowledge management*, dan *risk management*. Tiga aspek ini harus menjadi satu kesatuan konsep dan model dalam pengelolaan organisasi BPK ke depan.

Agung juga berharap para peserta dapat menjadikan momentum raker kali ini sebagai penyemangat untuk memantapkan rencana kerja 2022. Yaitu untuk terus memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan peran BPK sebagai SAI.

■ **Harry Azhar Azis (Alm)**

■ **Daniel Lumban Tobing**

"Baik dalam peran *oversight, insight, foresight,* maupun sebagai lembaga negara yang menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sehingga pada gilirannya tata kelola keuangan negara dapat mewujudkan tujuan bernegara," ungkapnya.

Menutup arahannya, Agung berpesan kepada para pelaksana BPK untuk berkomitmen secara berkesinambungan memperkuat sistem tata kelola di BPK. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga dan meningkatkan resiliensi secara kelembagaan.

"Apa arah penguatan sistem tata kelola itu? Suatu sistem tata kelola modern yang didasari meritokrasi, transparansi, akuntabiltas, dan berorientasi kinerja. Serta senantiasa berupaya untuk mengembangkan terobosan, inovasi, dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan manfaat tata kelola. Khususnya tata kelola keuangan negara. Untuk BPK yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik," tutupnya.

Raker Pelaksana BPK Tahun 2021 dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian para pelaksana baik lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan. ●

Tahun Terbaik BPK

■ **Agus Joko Pramono**

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menambahkan bahwa ini merupakan tahun terbaik berdasarkan laporan dan capaian BPK. Laporan dan capaian yang dikemukakan ketua membuktikan kerja sama yang telah dilakukan pada periode yang lalu dan saat ini telah membuahkan hasil. "Kita patut mempertahankan bahkan wajib menyongsong BPK yang lebih baik lagi," tutur dia.

Dia juga menjelaskan bahwa tema "Bersama Melangkah untuk BPK Tangguh dan Indonesia Maju" mengandung arti bahwa BPK merupakan bagian dari Republik Indonesia. Karenanya, bersama-sama harus mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu yang tercantum dalam konstitusi.

Dia juga mengingatkan bahwa raker pelaksana merupakan sarana refleksi dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang didapatkan selama ini. Selain itu, sarana untuk memantapkan dan menyepakati rencana kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan dalam konteks implementasi Renstra 2020-2024.

"Raker ini juga sebagai sarana memperkuat komitmen, sinergi, kolaborasi, dan kebersamaan untuk menghadapi tahun 2022," ucap dia.

Satu hal yang menurutnya penting adalah saat ini dunia memasuki era digitalisasi. Mereka yang tidak melakukan digitalisasi maka akan tertinggal.

Alasannya, ujar Agus, seluruh sendi negara dan masyarakat saat ini telah bertransformasi secara digital. "Esensi dari transformasi digital adalah menghilangkan ruang dan waktu. Jadi bila kita bekerja menggunakan laptop namun masih bekerja sukuensial maka belum bertransformasi digital" ucap dia.

Transformasi digital ini yang bisa membuat insan BPK bekerja kapan saja dan di mana saja. Tanpa perlu membedakan ruang dan waktu. Akan tetapi justru yang lebih penting adalah model transformasinya tepat, yaitu mengarah pada *e-government* dan *digital government* di Indonesia. "Agar kita tidak kehilangan momentum, dalam raker ini juga perlu dipahami bahwa BPK telah menetapkan *enterprise architecture*," tutur dia.

Transformasi digital ini juga mendorong BPK menggunakan *big data* dan *artificial intelligence*. AKN II, ucap dia, telah melakukan hal untuk mengumpulkan dan memformulasikan bentuk data yang bisa digunakan untuk pemeriksaan.

"Sebenarnya pemeriksaan itu bentuknya sederhana. Ketika kita menggunakan sembilan metode pemeriksaan, tujuh dari sembilan metode ini bisa menggunakan mesin. Sementara yang tidak bisa adalah metode analis, seperti *interviewing* dan analisis personal," tutur dia.

Agus menjelaskan, strategi renstra 2020-2024 memberikan BPK ruang untuk perubahan secara masif, fleksibel, dan inovatif. "Saat ini Anda tidak perlu lagi berpikir bahwa dokumen juknis dan juklak itu dokumen yang statis atau tidak," tutur dia. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

SEMAKIN MUDAH MENGAKSES INFORMASI MELALUI...

www.bpk.go.id

BPK RI Official

@bpkri

@bpkriofficial

08111907010

bpk.ri

PPID
EPPID Mobile

foto: wayhomestudio-freepik

KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA BAGI PEMERIKSA, PERLUKAH?

■ OLEH **INDRA EKO WICAKSONO**
PRANATA HUMAS PERTAMA PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Idealnya seorang pemeriksa tidak hanya harus memperhatikan aspek efektivitas dalam komunikasinya dengan terperiksa, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kelayakan yang melingkupi setiap interaksinya bersama terperiksa.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara agar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean governance* dalam penyelenggaraan negara. Tugas untuk mengawal pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dengan melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek keuangan negara. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, mau tidak mau, pemeriksa BPK harus melakukan interaksi dengan terperiksa untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan materi pemeriksaan yang dijalankan. Salah satu bentuk interaksi yang paling banyak dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi antara pemeriksa dengan terperiksa membawa implikasi yang luas terhadap hasil pemeriksaan BPK di entitas yang bersangkutan. Dengan adanya komunikasi yang efektif dengan terperiksa maka akan memudahkan pemeriksa dalam melaksanakan setiap program pemeriksaan yang telah dirancang sebelumnya.

Komunikasi yang efektif ini pun sebenarnya telah ditegaskan dalam Standar Audit Internasional Nomor 260 yang dikeluarkan oleh ISSAI (*International Standards of Supreme Audit Institutions*). Secara khusus di pasal 4a disebutkan bahwa komunikasi dua arah yang efektif antara pemeriksa dengan terperiksa berfungsi untuk membangun suatu hubungan kerja yang konstruktif sambil tetap mempertahankan independensi dan obyektivitas pemeriksa. Selain itu, dengan adanya komunikasi dua arah yang efektif antara pemeriksa dengan terperiksa maka diharapkan, dalam jangka panjang, akan terjalin suatu hubungan yang harmonis antara lembaga pemeriksa (BPK) dengan lembaga yang diperiksa (*auditee*/entitas terperiksa) sehingga nantinya kedua lembaga tersebut dapat saling bersinergi menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Efektivitas atau Kepatutan?

Menurut Brian H. Spitzberg (1997), interaksi dikatakan efektif selama tujuan atau hasil yang diharapkan dapat terpenuhi dengan pengorbanan atau alternatif yang relatif rendah (Samovar & Porter, 1997:380). Melalui suatu komunikasi yang efektif, seseorang dapat meningkatkan kendalinya terhadap perilakunya sendiri dan terhadap perilaku lingkungan sekitarnya (Gudykunst & Kim, 2003:361), dalam arti terpenuhinya tujuan-tujuan komunikasi yang diinginkan.

Namun demikian, sepatutnya ada hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dalam konteks hubungan antara sesama manusia, keefektifan dalam berkomunikasi bukanlah satu-satunya tujuan. Bahkan dalam konteks spesifik, hal tersebut kadang tidak menjadi ukuran keberhasilan komunikasi seseorang. Tidak jarang seseorang lebih dihargai atau dihormati ketika dia mampu berkomunikasi dengan lawan bicaranya secara layak atau patut (*appropriate*) meskipun kadang komunikasi yg terjadi tidak efektif. Sebaliknya, konflik akan mudah terjadi diantara orang-orang yang berinteraksi apabila ada salah satu pihak yang berkomunikasi secara tidak layak atau tidak patut (*inappropriate*)

kepada lawan bicaranya. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya kepatutan dalam berkomunikasi juga memiliki nilai penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Komunikasi dikatakan layak atau patut apabila selaras dengan nilai atau norma yang berlaku dalam budaya setempat.

Menyadari hal tersebut maka idealnya seorang pemeriksa tidak hanya harus memperhatikan aspek efektivitas dalam komunikasinya dengan terperiksa, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kelayakan yang melingkupi setiap interaksinya bersama terperiksa. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan layak, seseorang perlu membekali dirinya dengan suatu kompetensi komunikasi antarbudaya.

Komunikasi dan Budaya

Pada dasarnya, komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri, sebab menurut Hall (1959), budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Budaya tidak hanya memengaruhi komunikasi, tapi juga dibentuk melalui komunikasi itu sendiri (Martin & Nakayama, 2010:107). Budaya merupakan kerangka petunjuk yang kompleks yang berisikan pola tradisi, kepercayaan, nilai, norma, simbol-simbol, dan makna yang saling dibagikan hingga tingkat tertentu oleh anggota-anggota kelompok dengan identitas tertentu yang saling berinteraksi (Oetzel, 2009:4). Sedangkan komunikasi, menurut Samovar, Porter & McDaniel (2010:16), merupakan suatu proses yang dinamis di mana manusia berusaha membagikan apa yang ada pada dirinya kepada manusia yang lainnya melalui penggunaan simbol-simbol.

> **Sudah saatnya bagi kita untuk tidak lagi melihat perbedaan latar belakang budaya seseorang secara sempit.**

Sementara itu, komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*), oleh Rogers & Steinfart (1999) diartikan secara sederhana, tetapi efektif, sebagai komunikasi yang terjadi diantara individu dan lembaga/kelompok yang secara budaya berbeda (Oetzel, 2009:15). Sedangkan terkait dengan kompetensi komunikasi antarbudaya atau *intercultural communication competence* (ICC), hal itu didefinisikan secara global oleh Fantini (2006) sebagai suatu kemampuan yang kompleks yang dibutuhkan untuk dapat melakukan interaksi secara efektif dan layak dengan orang lain yang secara bahasa dan budaya berbeda dengan dirinya (Sinicrope, Norris, & Watanabe, 2007:1).

Intercultural communication competence (ICC)

Kompetensi komunikasi antarbudaya atau *Intercultural communication competence* (ICC) didefinisikan secara global oleh Fantini (2006) sebagai suatu kemampuan yang kompleks yang dibutuhkan untuk dapat melakukan interaksi secara efektif dan layak dengan orang lain yang secara bahasa dan budaya berbeda dengan dirinya (Sinicrope, Norris, & Watanabe, 2007:1). Latar belakang budaya yang berbeda ini merupakan hasil dari suatu keberagaman budaya (*cultural diversity*) yang ada dalam masyarakat.

Keberagaman budaya menurut Cox (1993) adalah suatu representasi, dalam satu sistem sosial, atas orang-orang yang secara nyata berbeda afiliasi kelompok budaya. Afiliasi kelompok budaya ini termasuk di antaranya karakteristik-karakteristik seperti budaya bangsa, ras, etnis, jenis kelamin, pangkat atau jabatan di dalam pekerjaan, kelas sosial, usia, orientasi seksual, dan disabilitas (Oetzel, 2009:9).

Namun demikian, di era di mana manusia saling terkoneksi dengan sangat cepat, seketika bahkan nyaris tanpa sekat ruang dan waktu, perspektif tentang keberagaman budaya yang hanya mempertimbangkan atribut-atribut sosial budaya yang nyata, sejatinya menjadi kurang relevan untuk dijadikan sebagai satu-satunya pijakan dalam melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Martin (2015:2), sudah saatnya diskusi terkait kompetensi komunikasi antarbudaya beranjak dari asumsi bahwa kelompok budaya besar sebagai sesuatu yang homogen di mana setiap individu dianggap memiliki budaya yang tunggal (*singular*). Atau secara sederhana dikatakan bahwa sudah saatnya bagi kita untuk tidak lagi melihat perbedaan latar belakang budaya seseorang secara sempit, yaitu hanya berdasarkan bangsa, etnis, atau bahkan agama yang dimiliki, melainkan seharusnya secara lebih spesifik per individu tergantung dengan konteks yang melatarbelakangi setiap interaksi komunikasi.

Dalam membahas ICC, salah satu model yang dapat digunakan adalah model yang digagas oleh Brian H. Spitzberg, Profesor *School of Communication* di San Diego State University sekaligus penulis buku Interpersonal Communication Competence (1989). Model ICC Spitzberg jika dibandingkan dengan model ICC lainnya, melakukan pendekatan yang lebih integratif di dalamnya. Dalam model ICC yang lain memang disajikan daftar mengenai se-

jumlah kemampuan atau sikap yang dapat digunakan dalam suatu komunikasi antarbudaya, tetapi tidak ada integrasi di dalamnya, karena tidak mungkin mengetahui kemampuan mana yang paling penting untuk dimiliki dalam suatu situasi tertentu, atau bahkan bagaimana kemampuan-kemampuan tersebut saling terkait satu sama lain. Pendekatan integratif yang disajikan Spitzberg adalah model ICC yang tidak hanya konsisten dengan literatur-literatur teoritis dan empiris, tetapi juga menyajikan prediksi yang spesifik terhadap perilaku yang kompeten (Samovar & Porter, 1997: 380). Yang istimewa adalah, bahwasanya model ICC Spitzberg ini juga membicarakan mengenai konteks spesifik yang melatarbelakangi setiap komunikasi antarbudaya.

Model ICC oleh Spitzberg ini kemudian dielaborasi melalui beberapa proposisi. Proposisi-proposisi ini selanjutnya dirinci ke dalam tiga tingkatan analisis situasi, yaitu (1) sistem individu, (2) sistem episodik, dan (3) sistem relasional. Sistem individu mencakup seluruh karakteristik yang mungkin dimiliki oleh seorang individu yang dapat memfasilitasi terjadinya interaksi yang kompeten dalam suatu kondisi sosial yang normatif. Sementara itu, sistem episodik mencakup keseluruhan fitur yang dimiliki oleh aktor yang dapat memfasilitasi suatu impresi yang kompeten oleh koaktor dalam suatu episode spesifik dalam interaksi. Dan dalam sistem relasi mencakup seluruh komponen yang dapat membantu meningkatkan kompetensi seseorang sepanjang hubungan (*entire span of relationships*) di antara aktor dan koaktor. Setiap sistem, secara berurutan, mencakup logika dan prediksi dari sistem yang sebelumnya.

Sementara itu, berbicara tentang komunikasi antarbudaya tidak akan pernah lepas dari pembahasan mengenai konteks. Komunikasi itu sendiri berhubungan erat dengan konteks. Dengan siapa dan di mana kita berada sangat menentukan pendekatan yang kita gunakan ketika melakukan aktivitas komunikasi. Pun begitu dengan budaya. Pada dasarnya setiap aktivitas komunikasi antarbudaya yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari konteks yang menyertainya.

Konteks dicirikan sebagai suatu aspek fisik atau sosial dari sebuah situasi dimana komunikasi itu terjadi. Manusia berkomunikasi secara berbeda bergantung terhadap konteks yang dihadapi. Konteks itu sendiri tidak statis dan bukanlah tujuan dari komunikasi. Selain itu, konteks juga dapat saling tumpang tindih. Konteks dapat terdiri dari struktur sosial, politik, dan sejarah dimana komunikasi tersebut terjadi (Martin & Nakayama, 2010:109). Menurut Shimanoff (1980), konteks menyajikan suatu panduan mengenai perilaku apa yang harusnya dilakukan, apa yang sebaiknya dipilih, serta apa yang tidak boleh dilakukan. Terkait penelitian ini, terdapat beberapa konteks yang biasanya terdapat dalam komunikasi antara pemeriksa BPK dengan terperiksa dalam suatu kegiatan pemeriksaan, yaitu tempat kerja (*workplace*), situasi, jarak kekuasaan (*power distance*), dan *low-and high-context culture*.

Kompetensi komunikasi antarbudaya semakin relevan untuk dibicarakan, terutama bagi pemeriksa, karena antara pemeriksa dan terperiksa pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan konteks yang terjadi dalam setiap kegiatan pemeriksaan juga pasti berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, perlu bagi setiap pemeriksa BPK untuk membekali dirinya dengan suatu kompetensi komunikasi antarbudaya yang memadai sehingga diharapkan komunikasi yang terjalin antara pemeriksa dengan terperiksa tidak hanya efektif tetapi juga patut. ●

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Cresswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design* (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Daymon, C., & Holloway, I. (2011). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications* (2nd Ed.). New York, NY: Routledge.

Martin, J. N., & Nakayama, T. (2010). *Intercultural Communication In Contexts* (5th Ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Oetzel, J. G. (2009). *Intercultural Communication: A Layered Approach*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Samovar, L. A., & Porter, R. E. (1997). *Intercultural Communication: A Reader* (8th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Samovar et al. (2010). *Communication Between Cultures* (7th Ed.). Boston, MA: Wadsworth.

Wiyata, A. L. (2006). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Jurnal:

Martin, J. N. (2015). Revisiting Intercultural Communication Competence: Where to go from here. *International Journal of Intercultural Relations 48*, 6-8.

Sinicrope et al. (2007). Understanding and Assesing Intercultural Competence: A Summary of Theory, Research, and Practice (Technical report for the foreign language program evaluation paper). Second Language Studies, 26 (1), 1-58.

Thanh, N. C., & Thanh, T. T. L. (2015). The Interconnection Between Interpretivist Paradigm and Qualitative Methods in Education. *American Journal of Educational Science Vol. 1, No. 2*, 24-27.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

1-3
Penyerahan IHPS I Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, 16 Desember 2021.

4
Kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Gedung BPK RI, 23 November 2021.

5
Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan apresiasi pada kegiatan pertemuan Ikistra dan DWP Setjen BPK Catur Wulan III dan HUT DWP Ke-22, 22 Desember 2021.

6
Penutupan Raker Pelaksana 2021 oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, 27 Desember 2021.

7-8
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri menghadiri acara *Opening Ceremony Presidensi Group of Twenty* (G20) Indonesia yang digelar di Lapangan Banteng, 1 Desember 2021.

9
Supervisi Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto ke Bakamla RI, 21 Desember 2021.

10
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tanda tangani kesepakatan bersama Protokol Pemeriksaan Bidang Perpajakan, 27 Desember 2021.

11
Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi menghadiri rapat konsultasi di Ruang Rapat BAKN, 26 November 2021.

12
Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Harry Azhar Azis (Alm) memberikan arahan dalam Rapat Pokja AKN V, 30 November 2021.

13
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam orasi ilmiah sertifikasi CSFA recognition program, 29 Desember 2021.

14
Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing menerima gelar *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) *Recognition Program* pada peluncuran sertifikasi CIAE yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Pusat BPKP, 22 November 2021. Turut hadir Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Menteri BUMN Erick Thohir.

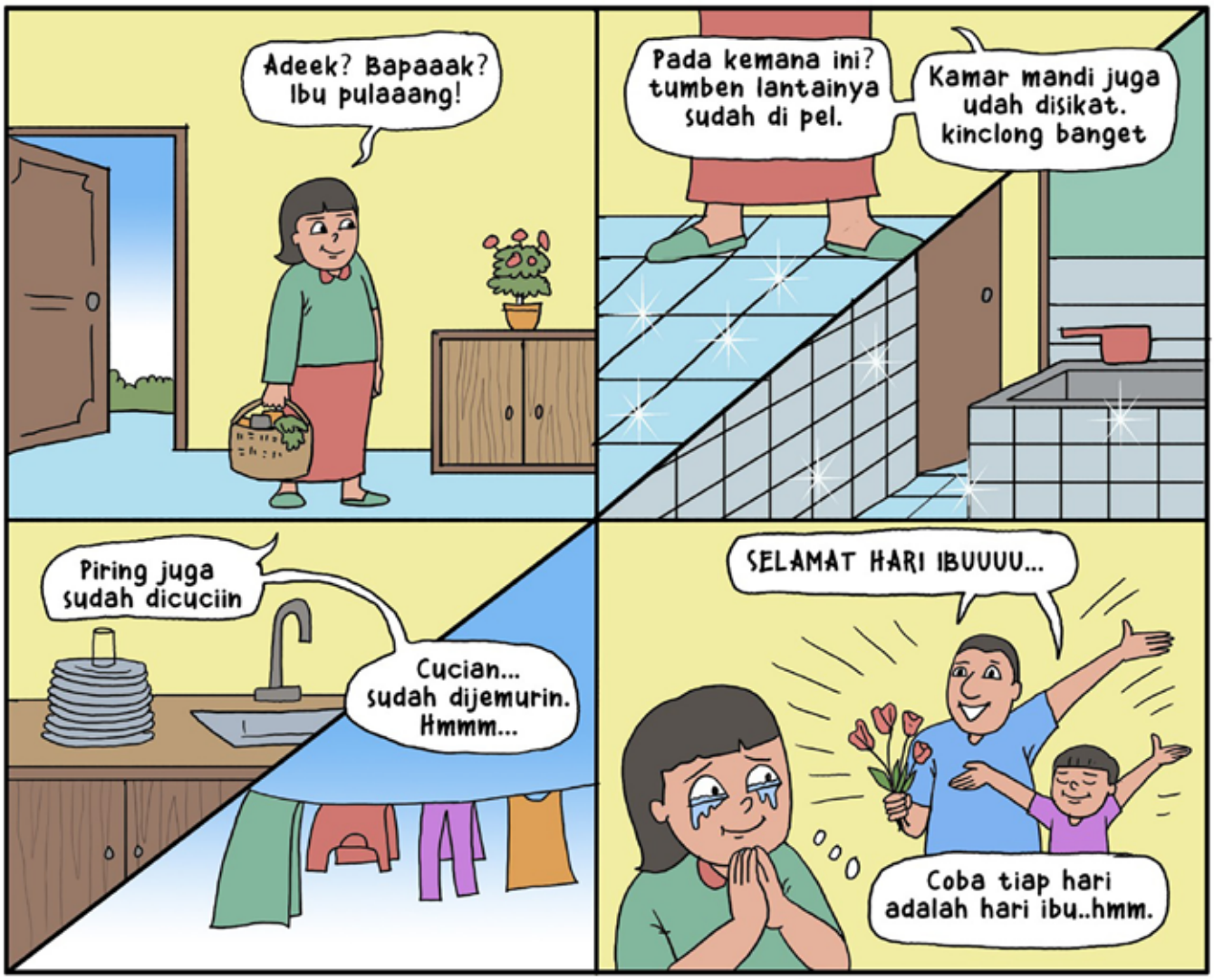

Kuis

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi November, disebutkan bahwa BPK memperoleh penghargaan Gatra Awards.
Kategori penghargaan apa yang didapatkan BPK?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit.
Jawaban dapat dikirim melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek **'Kuis'**.
Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat.
Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

TTS GEBYAR BPK

TEKA TEKI SILANG

DIRGAHAYU BPK RI 75 1 JANUARI 1947-2022

wartapemeriksa.bpk.go.id

Hadiah Utama

10 Orang Pemenang
E wallet @750rb

Hadiah Hiburan

75 Orang Pemenang
E wallet @75rb

GRATIS

TERBUKA UNTUK

UMUM

BPK RI

@bpkriofficial @humasbpkri.official @bpkri BPK RI Official @bpk.ri

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun

Telah berpulang ke Rahmatullah

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

18 Desember 2021